

PERUBAHAN KE II RENCANA STRATEGIS TAHUN 2016-2021



DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA BLITAR Jl. Jawa No. 64 C Blitar

Lampiran Peraturan Walikota Blitar No 23 Tahun 2018

Tentang Perubahan Kedua Peraturan Walikota Blitar No 81 Tahun 2016
tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021
di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar

2018

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahNya, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar telah dapat menyusun Perubahan Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar tahun 2016 – 2021. Hal ini dimaksudkan guna menentukan arah dan pedoman yang rasional untuk mencapai tujuan dan sasaran, menentukan kebijakan dan program serta kegiatan yang lebih jelas dan konkrit untuk mengevaluasi kinerja yang lebih kondusif. Tujuannya untuk merumuskan dan menjabarkan tujuan utama organisasi dengan mempertimbangkan kondisi dan potensi yang ada.

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis tahun 2016 – 2021 digunakan sebagai acuan Rencana Kerja Tahunan (RENJA) dan merupakan pedoman dalam rangka pencapaian tujuan agar tepat sasaran sebagai salah satu alat mengukur dan mengevaluasi akuntabilitas kinerja.

Kami sadar bahwa dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis ini masih belum sempurna menyadari keterbatasan yang ada, maka kami berharap semua pihak dapat memberikan saran dan masukan demi sempurnanya penyusunan lebih lanjut.

Blitar, Juli 2018
Kepala Dinas Perdagangan dan
Perindustrian Kota Blitar



ARIANTO S.Ses., M.Si.

Pembina Tk I

NIP 19691018 199101 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Landasan Hukum.....	I-3
1.3. Maksud dan tujuan	I-5
1.5.Sistematika Penulisan	I-6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	II-1
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	II-1
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	II-13
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	II-17
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	II-27
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	III-1
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	III-1
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	III-2
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi	III-3
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD	III-7
3.5. Penentuan Isu Isu Strategis	III-9
BAB IV TUJUANDAN SASARAN	IV-1
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	V-1

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAN.....	VI-1
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN ...	VII-1
BAB VIII PENUTUP.....	VIII-1

DAFTAR TABEL

1.	Gambar 1.1. Hubungan Keterkaitan antar Dokumen Perencanaan	I-2
2.	Gambar 2.2.1. Bagan Susunan Organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar	II-7
3.	Tabel 2.2.1 Keadaan Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	II-20
4.	Tabel 2.2.2 Keadaan Pegawai Berdasarkan Golongan	II-21
5.	Tabel 2.2.3 Keadaan Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan	II-22
6.	Tabel 2.2.4 Data Asset Dinas Perindustrian dan Perdagangan	II-22
7.	Tabel 2.3.1 Perkembangan pada Industri Formal	II-26
8.	Tabel 2.3.2 Perkembangan pada Industri Non Formal	II-27
9.	Tabel 2.3.3 Rekapitulasi Jumlah Rekomendasi IUI yang diterbitkan Bidang Perindustrian	II-27
10.	Tabel 2.3.4 Rekapitulasi Data Rekomendasi yang diterbitkan di Bidang Perdagangan	II-28
11.	Tabel 2.3.5 Data UTTP bertanda Tera Syah di Bidang Perdagangan	II-29
12.	Tabel 2.3.6 Rekapitulasi Data Penanaman Modal dan Nilainya Investasinya	II-29
13.	Tabel 2.3.7 Rekapitulasi Data Sertifikasi HKI di Bidang Promosi dan Penanaman Modal	II-30
14.	Tabel 2.3.8 Perkembangan data Industri tahun 2010-2015	II-30
15.	Tabel 2.3.9 Pencapaian Pelayanan Kinerja Disperindag Kota Blitar Tahun 2010-2015	II-31
16.	Tabel 2.3.10 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Disperindag Kota Blitar	II-33
17.	Tabel 4.1.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar 2016	IV-2
18.	Tabel 4.1.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar 2017-2018 ...	IV-3
19.	Tabel 4.1.3 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar 2019-2021 ...	IV-4

20. Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	V-2
21. Tabel 6.1.1 Rencana, Program, Keg, Indikator Kinerja Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2016	VI-2
22. Tabel 6.1.2 Rencana, Program, Keg, Indikator Kinerja Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2017	VI-8
23. Tabel 6.1.3 Rencana, Program, Keg, Indikator Kinerja Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2018	VI-14
24. Tabel 6.1.3 Rencana, Program, Keg, Indikator Kinerja Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2019-2021	VI-22
25. Tabel 7.1.1 Indikator Kinerja Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Blitar yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2016	VII-3
26. Tabel 7.1.2 Indikator Kinerja Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Blitar yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2017.....	VII-3
27. Tabel 7.1.2 Indikator Kinerja Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Blitar yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2018-2021.....	VII-4

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Blitar Tahun 2005-2025 telah disahkan sebagai pedoman utama arah pembangunan jangka panjang Kota Blitar. Untuk menjadikan pelaksanaan pembangunan tersebut lebih sistematis, efektif dan terfokus maka dibutuhkan perencanaan jangka menengah yang dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang kemudian dijabarkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) masing-masing OPD. RENSTRA Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2016-2021 disusun untuk menjadi pedoman arah pembangunan bidang perdagangan dan perindustrian selama periode lima tahun ketiga pembangunan jangka panjang 2005-2025.

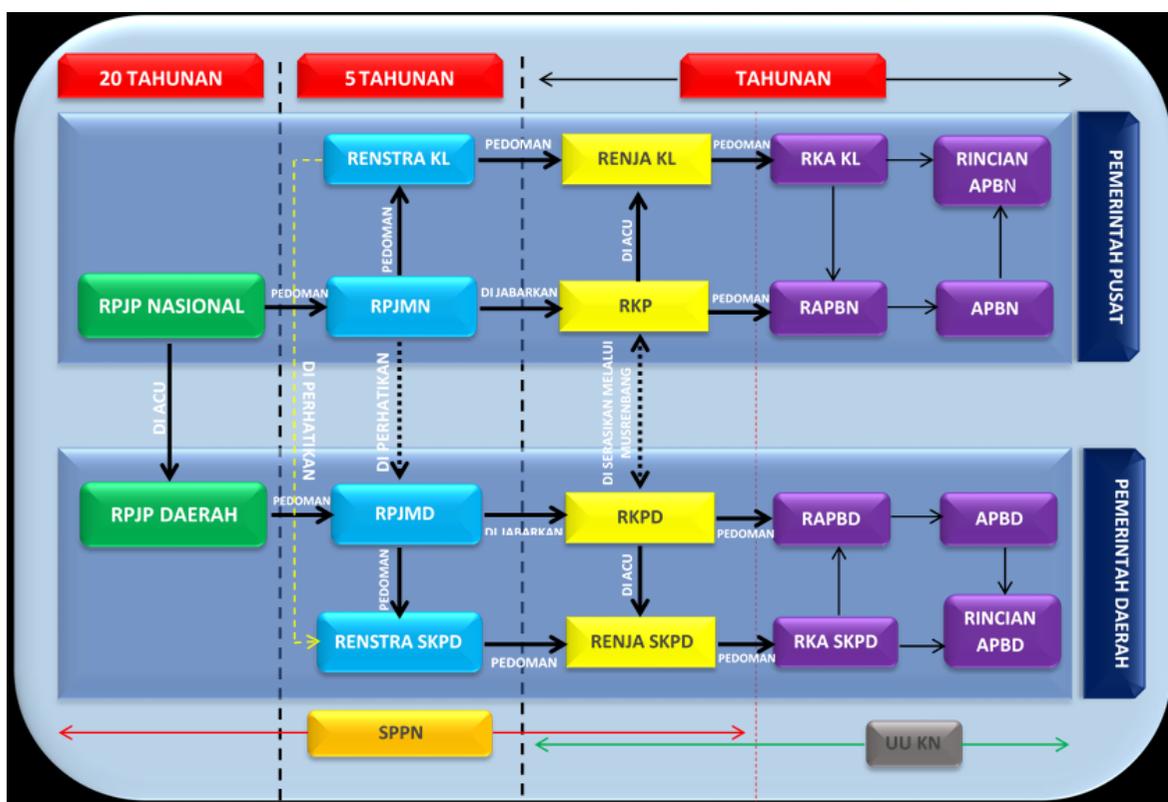
Perencanaan pembangunan daerah adalah proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 272 mengamanatkan kepada Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah di setiap Perangkat Daerah untuk jangka waktu lima tahun. Renstra PD disusun sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

Sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 050/795/SJ tanggal 4 Maret 2016, penyusunan dokumen perencanaan pembangunan termasuk didalamnya Renstra PD tetap mengacu pada Permendagri 54 Tahun 2010 dengan memperhatikan pasal 272 UU 23

tahun 2014 sehingga tahapan penyusunan renstra PD dimulai dari tahapan persiapan penyusunan Renstra PD, penyusunan rancangan Renstra PD, penyusunan rancangan akhir Renstra PD sampai dengan tahapan penetapan Renstra PD dimana pada Renstra PD tidak lagi memuat visi dan misi perangkat daerah.

Adapun hubungan keterkaitan antara Renstra PD dan dokumen perencanaan lainnya sesuai Permendagri 54 tahun 2010 dapat dilihat pada bagan berikut :



Gambar 1.1. Hubungan Keterkaitan antar Dokumen Perencanaan

Dokumen ini disusun oleh tim perencana Dinas Perdagangan dan Perindustrian dengan mempertimbangkan berbagai aspek strategis, yaitu sumber daya yang dimiliki, proyeksi kebutuhan dan tantangan bidang Perdagangan dan Industri selama lima tahun ke depan. Penyusunan perubahan RENSTRA ini dilakukan karena beberapa hal, yaitu :

- Adanya perubahan Sasaran Strategis dan indikatornya serta penyederhanaan kegiatan tahun 2019-2021;
- Hasil evaluasi Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian menyatakan perlu adanya penyesuaian berupa perubahan Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian;

- c. Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- d. Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

1.2. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2016-2021 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar didasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, nomor 47,(tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4287).
- b. Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 104, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
- c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- d. Undang-Undang nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007).
- e. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- g. Peraturan pemerintah No 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

- h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- i. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
- j. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- k. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
- l. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 08 tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).

- q. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 03 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah provinsi Jawa Timur tahun 2014-2019.
- r. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 05 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur tahun 2011-2031.
- s. Peraturan Daerah Kota Blitar nomor 12 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Blitar tahun 2011 – 2030.
- t. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 02 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Blitar Tahun 2005 – 2025.
- u. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 04 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
- v. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar tahun 2016 - 2021.
- w. Peraturan Walikota Blitar Nomor 72 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
- x. Peraturan Walikota Blitar Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Walikota Blitar Nomor 81 Tahun 2016 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar adalah untuk menyediakan arah kebijakan pembangunan di bidang Perdagangan dan Perindustrian selama lima tahun, yang disusun berpedoman pada Perubahan RPJMD Kota Blitar Tahun 2016–2021

b. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar adalah :

- a. Mengidentifikasi kinerja pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian selama 5 (lima) terakhir pada periode pembangunan

yang lalu.

- b. Mengidentifikasi permasalahan dan isu strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian selama 5 (lima) tahun mendatang.
- c. Menjabarkan visi dan misi RPJMD Tahun 2016-2021 kedalam tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan.
- d. Menetapkan rencana program dan kegiatan Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang disertai pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun mendatang.
- e. Menetapkan kinerja penyelenggaraan bidang urusan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian selama 5 (lima) tahun mendatang.
- f. Menyediakan panduan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan RKA SKPD; dan
- g. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun.

1.4. SITEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar Tahun 2016 – 2021 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Disperdagin, fungsi Renstra Disperdagin dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Disperdagin, Keterkaitan Renstra Disperdagin dengan RPJMD, K/L dan Renstra Provinsi dan Renja Disperdagin.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas fungsi kewenangan Disperdagin, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Disperdagin.

1.3. Maksud dan Tujuan Renstra

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Disperdagin.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Disperdagin, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Disperdagin dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Disperdagin dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Disperdagin periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Disperdagin yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Disperdagin ini.

2.1. Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Disperdagin, struktur organisasi Disperdagin, serta uraian tugas dan fungsi.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Disperdagin dalam menjalankan tugas fungsinya, mencakup sumber daya manusia, aset/modal.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sub bab ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Disperdagin berdasarkan sasaran/target Renstra Disperdagin periode sebelumnya.

2.4. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Mengemukakan macam pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan .

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DISPERDAGIN

3.1. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah

Mengemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Bappeda beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2. Telaahan visi, misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Mengemukakan tugas dan fungsi Disperdagin yang terkait dengan visi, misi, serta program Walikota dan Wakil Walikota terpilih, termasuk faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Disperdagin yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Mengemukakan faktor-faktor penghambat ataupun pendorong dari pelayanan Disperdagin yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Bappeda ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Disperindag Provinsi dan Kota Blitar.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD

Mengemukakan faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Disperdagin yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Disperdagin ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.5. Penentuan Isu – isu strategis

Mengemukakan informasi isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Disperdagin.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang

**BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA
PENDANAAN**

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

BAB VIII PENUTUP

Berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah pembangunan sampai dengan Tahun 2021.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA BLITAR

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Sesuai dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 72 Tahun 2016, Dinas Perdagangan dan Perindustrian mempunyai tugas membantu walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dan bidang perindustrian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Dinas Perdagangan dan Perindustrian melaksanakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang perdagangan dan bidang perindustrian;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang perdagangan dan bidang perindustrian;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perdagangan dan bidang perindustrian;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang perdagangan dan bidang perindustrian;
- e. pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketetatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan;
- f. pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;
- g. penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;
- h. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- i. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- j. pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
- k. pengelolaan pengaduan masyarakat;

- l. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian secara berkala melalui *sub domain website* Pemerintah Daerah;
- m. pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Dinas Perdagangan dan Perindustrian; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya

Untuk melaksanakan fungsinya, Dinas Perdagangan dan Perindustrian mempunyai kewenangan :

- a. penetapan kebijakan operasional di bidang perdagangan dan bidang perindustrian;
- b. penetapan visi, misi, tujuan dan sasaran perumusan kebijakan teknis, penyusunan program, pengendalian, pembinaan dan pengawasan di bidang perdagangan dan bidang perindustrian;
- c. sosialisasi dan pelaksanaan standar nasional bidang perdagangan dan bidang perindustrian di tingkat kota ;
- d. pengkajian pemberian izin serta pencabutan izin bidang perdagangan dan bidang perindustrian;
- e. penyelenggaraan penyuluhan bidang perdagangan dan bidang perindustrian;
- f. pengusulan penataan organisasi, kelembagaan serta peningkatan kapasitas sumber daya aparatur bidang perdagangan dan bidang perindustrian;
- g. pengusulan rancangan peraturan bidang perdagangan dan bidang perindustrian;
- h. pemberian fasilitas usaha dalam rangka pengembangan IKM di kota;
- i. penyelenggaraan promosi produk industri kota;
- j. fasilitasi pelaksanaan penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri di kota;
- k. sosialisasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri;
- l. fasilitasi akses permodalan bagi industri melalui bank dan lembaga keuangan bukan bank di kota;
- m. pembinaan industri dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh industri tingkat kota;

- n. fasilitasi kemitraan antara industri kecil, menengah dan industri besar serta sektor ekonomi lainnya di kota;
- o. pembinaan asosiasi industri/dewan tingkat kota;
- p. pengumpulan, analisis dan diseminasi data bidang industri tingkat kota dan pelaporan kepada provinsi;
- q. pemberian rekomendasi izin usaha perdagangan di wilayah kota;
- r. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin/pendaftaran jasa bisnis dan jasa distribusi di wilayah kota;
- s. pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi perdagangan barang kategori dalam pengawasan skala kabupaten/kota (SIUP Minuman Beralkohol golongan B dan C untuk Pengecer, Penjualan Langsung untuk diminum di tempat, Pengecer dan Penjualan Langsung untuk diminum di tempat untuk Minuman Beralkohol mengandung Rempah sampai dengan 15%);
- t. pengawasan, pelaporan pelaksanaan dan penyelenggaraan serta penyajian informasi pelaksanaan wajib daftar perusahaan skala kota;
- u. pembinaan dan pengawasan, pemberian rekomendasi skala tertentu, monitoring dan evaluasi sarana perdagangan (pasar/toko modern dan gudang) dan sarana penunjang perdagangan (jasa pameran, konvensi, dan seminar dagang) skala lokal;
- v. penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan informasi pasar dan stabilisasi harga di kota;
- w. pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri skala kota;
- x. pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen di kota;
- y. sosialisasi, informasi dan publikasi tentang perlindungan konsumen.
- z. pelayanan dan penanganan penyelesaian sengketa konsumen skala kota;
- å. pembinaan dan pemberdayaan Motivator dan Mediator Perlindungan Konsumen skala kota;
- ä. pengusulan pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di kota kepada pemerintah berkoordinasi dengan provinsi dan fasilitasi operasional BPSK.

- ö. pendaftaran dan pengembangan Lembaga Pemberdayaan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM);
- aa. koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen;
- bb. pengawasan barang beredar dan jasa serta penegakan hukum skala kota;
- cc. koordinasi pelaksanaan pengawasan barang beredar dan jasa skala kota;
- dd. sosialisasi kebijakan pengawasan barang beredar dan jasa skala kota;
- ee. penyelenggaraan, pelaporan dan rekomendasi atas pendaftaran petunjuk penggunaan (manual) dan kartu jaminan/garansi dalam bahasa Indonesia bagi produk teknologi informasi dan elektronika skala kota;
- ff. pelaksanaan dan pelaporan sistem informasi perdagangan dan penyusunan potensi usaha di sektor perdagangan skala kota;
- gg. fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan metrologi legal setelah memperoleh penilaian dari pemerintah yang didasarkan rekomendasi provinsi.
- hh. fasilitasi dan pembinaan serta pengendalian SDM metrologi skala kota;
- ii. fasilitasi standar ukuran dan laboratorium metrologi legal.
- jj. pelayanan tera dan tera ulang Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) setelah melalui penilaian standar ukuran dan laboratorium metrologi legal oleh pemerintah.
- kk. fasilitasi penyelenggaraan kerjasama metrologi legal skala kota;
- ll. pelaksanaan penyuluhan dan pengamatan UTTP, Barang Dalam Kemasan Terbungkus (BDKT) dan Satuan Internasional (SI).
- mm. pembinaan operasional reparatir UTTP.
- nn. penyediaan bahan masukan sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan bidang ekspor;
- oo. penyediaan bahan masukan untuk perumusan kebijakan penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) dan penelusuran asal barang;
- pp. sosialisasi, penerbitan dan pelaporan penerbitan SKA penelusuran asal barang di tingkat kota yang ditunjuk.

- qq. penyediaan bahan masukan untuk penerbitan Angka Pengenal Importir(API);
- rr. pembinaan komoditas dalam rangka memperoleh akses pembiayaan resi gudang;
- ss. pemberian rekomendasi Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum (IUKU) yang sarana maupun energi listriknya dalam kota;
- tt. pemberian izin pembukaan kantor perwakilan perusahaan di sub sektor migas;
- uu. pengawasan pengendalian pendistribusian dan tata niaga bahan bakar minyak dari agen dan pangkalan dan sampai konsumen akhir di wilayah kota;
- vv. pemantauan dan inventarisasi penyediaan, penyaluran dan kualitas harga BBM serta melakukan analisa dan evaluasi terhadap kebutuhan/penyediaan BBM di wilayah kota;
- zz. pemberian rekomendasi izin lokasi pendirian Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU);
- aaa. peremajaan data dalam bidang perdagangan dan bidang perindustrian untuk tingkat kota ;
- bbb. pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana bidang perdagangan dan bidang perindustrian.

SUSUNAN ORGANISASI

Susunan Organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian terdiri dari:
Kepala Dinas

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang membawahi :

- 1) Sub Bagian Program dan Kepegawaian;
- 2) Sub Bagian Umum, Keuangan dan Penatausahaan Barang.

Bidang Pengembangan Perdagangan dan Pasar, membawahi :

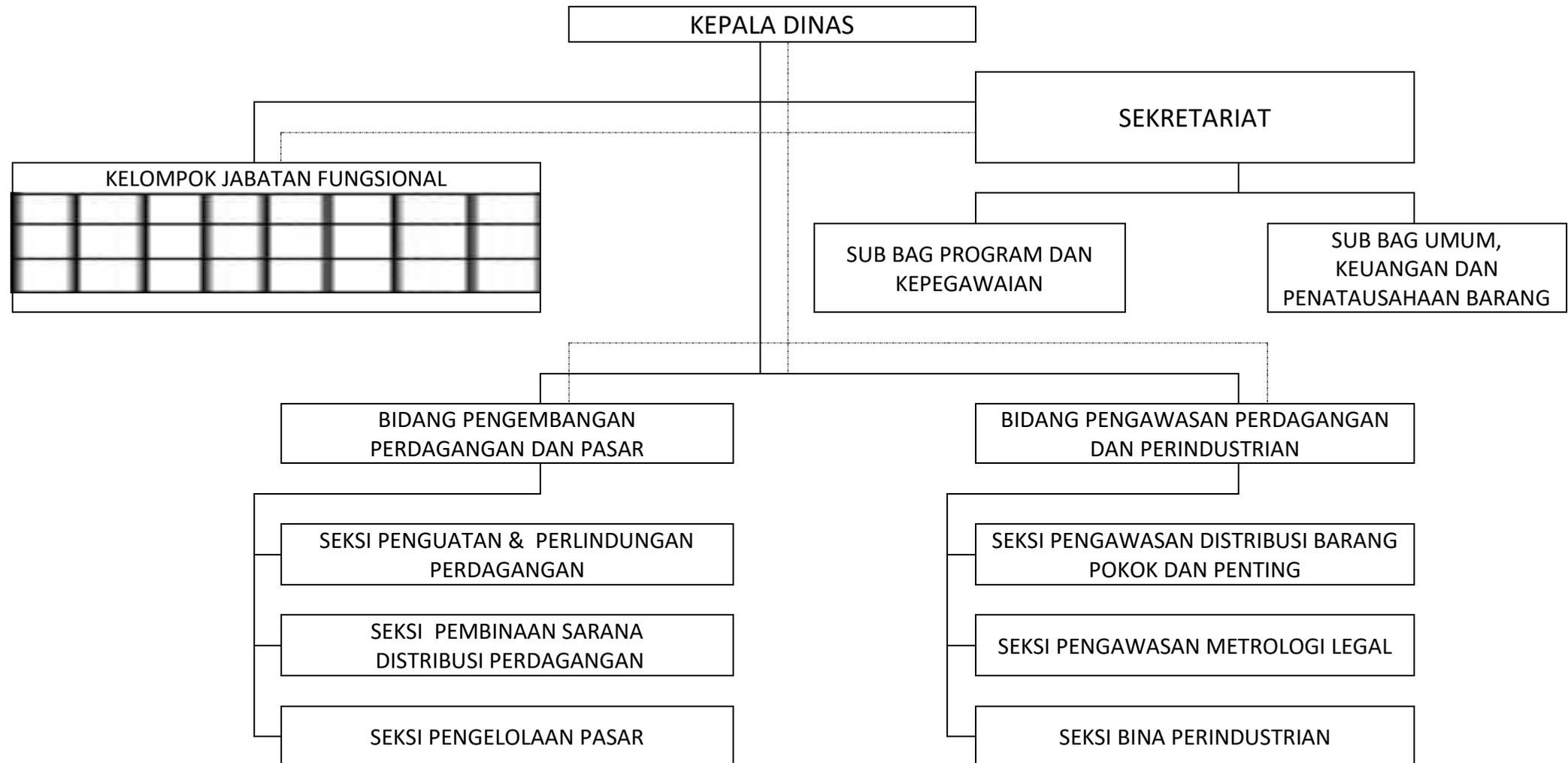
- 1) Seksi Penguatan dan Perlindungan Perdagangan;
- 2) Seksi Pembinaan Sarana Distribusi Perdagangan;
- 3) Seksi Pengelolaan Pasar.

Bidang Pengawasan Perdagangan dan Perindustrian, membawahi :

- 1) Seksi Pengawasan Distribusi Barang Pokok dan Penting;
- 2) Seksi Pengawasan Metrologi Legal;
- 3) Seksi Bina Perindustrian.

Kelompok Jabatan Fungsional.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN



Gambar 2.1. Bagan Susunan Organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan, memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Walikota .

Sekretaris

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas meliputi perencanaan, mengkoordinasikan tugas pada bidang – bidang, pengelolaan administrasi umum, rumah tangga, administrasi kepegawaian, kearsipan dan administrasi keuangan;

Untuk menjalankan tugasnya, Sekretariat Dinas Perdagangan dan Perindustrian menjalankan fungsi :

- a. pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Kepala Dinas ;
- b. pengkoordinasian dan penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja masing – masing bidang secara terpadu;
- c. pengkoordinasian dan fasilitasi kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi bidang-bidang di lingkungan Dinas;
- d. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan penyusunan program / kegiatan Sekretariat;
- e. pengkoordinasian dan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT);
- f. pengkoordinasian dan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA);
- g. pengkoordinasian penyusunan dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- h. fasilitasi penyusunan Penetapan Kinerja (PK);
- i. pengkoordinasian dan fasilitasi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD);
- j. pengkoordinasian internal dan eksternal serta pembinaan penyelenggaraan organisasi dan tatalaksana organisasi Dinas;
- k. pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan urusan rumah tangga dan tata usaha Dinas;
- l. pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan administrasi perjalanan dinas, tugas-tugas keprotokolan dan kehumasan;
- m. pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan administrasi perlengkapan, sarana prasarana, keamanan kantor dan

- penyelenggaraan rapat-rapat Dinas;
- n. fasilitasi pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi;
 - o. fasilitasi pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi;
 - p. fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
 - q. pengkoordinasian pengusulan penataan organisasi, tata laksana dan produk hukum lainnya;
 - r. penyelenggaraan, pembinaan dan pengendalian pelayanan administrasi umum, kepegawaian, kearsipan dan penatausahaan keuangan;
 - s. fasilitasi pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan;
 - t. fasilitasi dan koordinasi penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP);
 - u. pengkoordinasian penyusunan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 - v. fasilitasi dan koordinasi penyusunan Standar Pelayanan Publik (SPP);
 - w. fasilitasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 - x. fasilitasi pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
 - y. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota (LKPJ), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
 - z. pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang perdagangan dan perindustrian;
 - aa. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan bidang perdagangan dan perindustrian secara berkala melalui *sub domain website* Pemerintah Daerah;
 - bb. pengkoordinasian penyusunan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja Dinas;
 - cc. pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Sub Bagian Program dan Kepegawaian

- (1) Sub Bagian Program dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Program dan Kepegawaian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris;

Sub Bagian Umum, Keuangan dan Penatausahaan Barang

- (1) Sub Bagian Umum, Keuangan dan Penatausahaan Barang dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Umum, Keuangan dan Penatausahaan Barang, yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris;

Bidang Pengembangan Perdagangan dan Pasar

- (1) Bidang Pengembangan Perdagangan dan Pasar dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan dan Pasar yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pengembangan Perdagangan dan Pasar mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis dan menyelenggarakan program dan/atau kegiatan di Bidang Pengembangan Perdagangan dan Pasar;

Untuk menjalankan tugasnya, Bidang Pengembangan Perdagangan menjalankan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pengembangan Perdagangan dan Pasar berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Kepala Dinas ;
- b. Penyusunan dan pelaksanaan program/kegiatan di bidang Pengembangan Perdagangan dan Pasar;
- c. Fasilitasi pengembangan ekspor untuk pelaku usaha tingkat kota;
- d. Pelaksanaan pembinaan pengelola sarana distribusi;
- e. Fasilitasi rekomendasi pemberian perijinan pendaftaran perusahaan;
- f. Pembinaan pelaku usaha perdagangan;
- g. Pelaksanaan pembinaan sarana distribusi perdagangan;
- h. Pembinaan pelaku usaha (pasar rakyat, pusat perbelanjaan, toko, eksportir dan importir);
- i. Fasilitasi pengawasan perijinan bagi pelaku usaha perdagangan;
- j. Fasilitasi pembinaan manajemen, pemasaran , pengelolaan usaha, modal, dan sarana usahakepada pedagang non formal /pedagang golongan ekonomi lemah , pedagang kecil dan PKL;
- k. fasilitasi bantuan modal, dan sarana usahakepada pedagang non formal /pedagang golongan ekonomi lemah , pedagang kecil dan PKL;
- l. Fasilitasi pengembangan kerja sama dan PKL, pedagang kecil, menengah, besar dalam rangka kemitraan;
- m. Penyiapan pembinaan perdagangan dalam rangka promosi produksi dalam negeri;
- n. Fasilitasi pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan pasar;

- o. Fasilitasi pemberian pertimbangan teknis perijinan di lingkungan pasar;
- p. pelaksanaan pendataan potensi retribusi daerah di bidang pengelolaan pasar
- q. pelaksanaan kerjasama dengan lembaga/badan/instansi terkait bidang pengelolaan pasar;
- r. pembinaan sumber daya manusia dan evaluasi pengelolaan pasar
- s. Pembinaan, pengendalian dan pelaporan kinerja di Bidang Pengembangan Perdagangan dan Pasar;
- t. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Penguatan dan Perlindungan Perdagangan

- (1) Seksi Penguatan dan Perlindungan Perdagangan dipimpin oleh Kepala Seksi Penguatan dan Perlindungan Perdagangan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan dan Pasar.

Seksi Pembinaan Sarana Distribusi Perdagangan

- (1) Seksi Pembinaan Sarana Distribusi Perdagangan dipimpin oleh Kepala Seksi Pembinaan Sarana Distribusi Perdagangan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan dan Pasar;

Seksi Pengelolaan Pasar

- (1) Seksi Pengelolaan Pasar dipimpin oleh Kepala Seksi Pengelolaan Pasar yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan dan Pasar;

Bidang Pengawasan Perdagangan dan Perindustrian

- (1) Bidang Pengawasan Perdagangan dan Perindustrian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pengawasan Perdagangan dan Perindustrianyang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pengawasan Perdagangan dan Perindustrian mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis dan menyelenggarakan program dan/atau kegiatan di Bidang Pengawasan Perdagangan dan Perindustrian;

Untuk menjalankan tugasnya, Bidang Pengawasan Perdagangan dan Perindustrian menjalankan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan perdagangan dan perindustrian dan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Kepala Dinas;
- b. Penyusunan program/kegiatan di bidang pengawasan

- perdagangan dan perindustrian;
- c. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan informasi pasar dan stabilitas harga;
 - d. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan pengawasan barang beredar dan jasa;
 - e. Pembinaan perlindungan konsumen terhadap barang-barang yang beredar dipasaran meliputi barang dalam keadaan terbungkus (BDKT), Alat ukuran, takaran, timbangan dan perlengkapan (UTTP);
 - f. pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri skala kota;
 - g. pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen di kota;
 - h. pelayanan dan penanganan penyelesaian sengketa konsumen skala kota;
 - i. pembinaan dan pemberdayaan Motivator dan Mediator Perlindungan Konsumen skala kota;
 - j. pengusulan pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di kota kepada pemerintah berkoordinasi dengan provinsi dan fasilitasi operasional BPSK.
 - k. koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen;
 - l. penyelenggaraan, pelaporan dan rekomendasi atas pendaftaran petunjuk penggunaan (manual) dan kartu jaminan/garansi dalam bahasa Indonesia bagi produk teknologi informasi dan elektronika skala kota;
 - m. pelaksanaan dan pelaporan sistem informasi perdagangan dan penyusunan potensi usaha di sektor perdagangan skala kota;
 - n. fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan metrologi legal setelah memperoleh penilaian dari pemerintah yang didasarkan rekomendasi provinsi;
 - o. fasilitasi dan pembinaan serta pengendalian SDM metrologi skala kota;
 - p. fasilitasi standar ukuran dan laboratorium metrologi legal;
 - q. Pelayanan tera dan tera ulang Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) setelah melalui penilaian standar ukuran dan laboratorium metrologi legal oleh pemerintah;
 - r. fasilitasi penyelenggaraan kerjasama metrologi legal skala kota;
 - s. pelaksanaan penyuluhan dan pengamatan UTTP, Barang Dalam Kemasan Terbungkus (BDKT) dan Satuan Internasional (SI);
 - t. pembinaan operasional reparatir UTTP;
 - u. pengawasan dan penyidikan tindak pidana Undang-Undang Metrologi Legal (UURL);
 - v. pemberian fasilitas usaha dalam rangka pengembangan IKM di kota;
 - w. pemberian perlindungan kepastian berusaha terhadap usaha industri di kota;
 - x. penyelenggaraan promosi produk industri kota;

- y. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada bidang pengawasan perdagangan dan perindustrian;
- z. Pelaksanaan pembinaan, pengembangan, dan pemberdayaan pada bidang perindustrian dan aneka usaha industri;
- aa. Pelaksanaan pemantauan dan pengendalian pada bidang urusan industri dan aneka usaha industri;
- bb. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada bidang pengawasan perdagangan dan perindustrian;
- cc. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai peraturan perundangan.

Seksi Pengawasan Distribusi Barang Pokok dan Penting

- (1) Seksi Pengawasan Distribusi Barang Pokok dan Penting dipimpin oleh Kepala Seksi Pengawasan Distribusi Barang Pokok dan Penting yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengawasan Perdagangan dan Perindustrian.

Seksi Pengawasan Metrologi Legal

- (1) Seksi Pengawasan Metrologi Legal dipimpin oleh Kepala Seksi Pengawasan Metrologi Legal yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengawasan Perdagangan dan Perindustrian;

Seksi Bina Perindustrian

- (1) Seksi Bina Perindustrian dipimpin oleh Kepala Seksi Bina Perindustrian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengawasan Perdagangan dan Perindustrian;

2.2 SUMBER DAYA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA BLITAR

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar tersebut di atas, didukung oleh sejumlah personil yang mengisi jabatan dan staf pelaksana sesuai stuktur yang telah ditetapkan, sarana dan prasarana penunjang dan sumber pembiayaannya.

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Keadaan pegawai di lingkungan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar sebagaimana terdapat pada tabel terlampir.

Tabel 2.2.1

Keadaan Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

JENIS KELAMIN	JUMLAH
Laki – Laki	59
Perempuan	11
Total	70

Sumber data : Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar Tahun 2018

Golongan ruang mempunyai keterkaitan dengan karier pegawai, dimana karier pegawai dapat mendukung tugas dan fungsi organisasi. Berdasarkan data yang ada, golongan ruang pegawai Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar terlihat dalam tabel berikut ini

Tabel 2.2.2

Keadaan Pegawai Berdasarkan Golongan

GOLONGAN	Jumlah
Pembina Tk. I (IV/b)	2
Pembina (IV/a)	1
Penata Tk. I (III/d)	6
Penata (III/c)	4
Penata Muda Tk.I (III/b)	2
Penata Muda (III/a)	2
Pengatur Tk I (II/d)	2
Pengatur (II/c)	27
Pengatur Muda Tk.I (II/b)	2
Pengatur Muda (II/a)	10
Juru Tk I (I/d)	1
Juru (I/c)	5
PTT	6
Jumlah	70

Sumber data : Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar Tahun 2018

Tingkat pendidikan pegawai merupakan faktor yang sangat penting di dalam pelaksanaan unit organisasi karena tanpa didukung oleh pendidikan yang memadai maka profesionalisme pegawai tidak akan terwujud. Untuk mengetahui tingkat

pendidikan yang dimiliki oleh aparatur Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 2.2.3
Keadaan Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH
S.2	2
S.1	10
D IV	2
D III	2
SLTA	35
SLTP	12
SD	7
Total	70

Sumber data : Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar Tahun 2018

2.2.2 Aset

Disamping sumber daya manusia yang profesional, ketersediaan aset/modal juga merupakan unsur penting dalam mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar telah dilengkapi dengan aset/modal yang diharapkan mampu mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Adapun jenis aset/modal yang dimiliki sampai saat ini terdapat dalam tabel terlampir.

Tabel 2.2.4
Data Aset Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar

NO	JENIS BARANG	JUMLAH
1	Gedung	3 Unit
2	Kendaraan Dinas	
	Roda Empat	3 Unit
	Roda Dua	8 Unit
3	Mesin Komputer	10 Unit
4	Pesawat Telepon	7 Unit
5	Listrik	1 Unit
6	PDAM	1 Unit

7	Kamera Foto	8 Unit
8	Meja Tamu	5 Unit
9	Jam Dinding	9 Unit
10	Brankas	2 Unit
11	Wireless	2 Unit
12	Filling Kabinet	12 Unit
13	Almari Kayu	11 Unit
14	Meja Tamu	28 Unit
15	Kursi Putar	19 Unit
16	Kursi Rapat	50 Unit
17	Kipas Angin	12 Unit
18	AC	9 Unit
19	Laptop	12 Unit
20	PABX	1 Unit
21	Printer	14 Unit
22	Genset	1 Unit
23	Mesin Pompa Air	1 Unit
24	Meja Kursi	10 Unit
25	Flasdisk	10 Unit
26	CCTV	8 buah Kamera 2 Monitor
27	Almari Arsip (Besi)	3 Buah
28	TV	2 Buah
29	Kulkas	1 Buah
30	Korden	50 Meter
31	Almari Arsip/Box File	2 buah
32	Kursi Kerja	16 Buah
33	Kursi Rapat	20 Buah
34	Kursi Tunggu	1 Buah
35	Peralatan Ketipung Dangdut	
	Bor Tangan (Electrical Drill)	4 Buah
	Bor Duduk (Breach Drilling Drill)	2 Unit
	Spray Gun	4 Buah
	Air Compresor	2 Unit
	Investor	2 Buah
	Gasoline Generator	2 Unit

	Dinamo (Elektrik Motor)	4 Buah
	Tatah Ukir	4 Set
36	Peralatan Konveksi Kaos	
	Mesin Jahit High Speed	4 Set
	Mesin Obras 5 Benang	4 Set
	Mesin Overdeck	4 Set
	Gunting Listrik	4 Unit
37	Peralatan Batik Cap dan Tulis	
	Meja Cap Lengkap	6 Unit
	Canting Cap 20 Motif	20 Buah
	Loyang Cap	6 Buah
	Kompur Gas Kecil Lengkap	6 Set
	Panci Piknik Listrik	24 Set
	Timbangan Gram Manual	6 Set
	Bak Bilas Plastik	48 Buah
	Pentangan Kayu	24 Buah
	Meja Kompur	6 Buah
	Dandang	4 Buah
	Wajan	24 Buah
	Kompur Gas Besar Lengkap	2 Set

2.3 KINERJA PELAYANAN DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA BLITAR

Kinerja pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar periode 2010-2015 merupakan hasil kinerja organisasi perangkat daerah sebelumnya yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar yang masih memiliki kewenangan pada 3 (tiga) urusan pemerintahan yaitu urusan perindustrian dan ESDM, urusan perdagangan dan urusan penanaman modal.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kota Blitar tahun 2010-2015 telah ditetapkan Rencana Strategis Pemerintah Kota Blitar 2010-2015 yang dirinci dalam Rencana Kerja dan kebijakan operasional Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar tahun 2010-2015.

Dinas Perdagangan dan Perindustrian merupakan salah satu OPD di lingkungan Pemerintah yang memiliki tugas pokok dan fungsi

sebagai berikut yang terdiri dari 13 (Tiga belas) program. Program ditujukan untuk meningkatkan peran masing –masing bidang dan bagian dalam perumusan kebijakan Kepala Daerah dalam mewujudkan keberhasilan pada sasaran yang direncanakan, yang inplementasinya ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar tahun 2010-2015 yang terinci dalam Program dan Kegiatan yang capaian Kinerjanya sebagai berikut :

‘KINERJA PELAYANAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA BLITAR 2010 – 2015

Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan salah satu OPD dilingkungan Pemerintah Kota Blitar yang terdiri dari Sekretariat, Bidang Pengembangan Perdagangan dan Pasar, Bidang Pengawasan Perdagangan dan Perindustrian b . Peran dan kontribusinya terhadap pembangunan. Sektor industri dan perdagangan telah menunjukkan peranan yang penting dan strategis bagi Kota Blitar. Untuk itu peran industri dalam perekonomian adalah dengan pengembangan industri kecil termasuk industri tradisional dalam penciptaan lapangan usaha lapangan kerja yang luas menjadi Prioritas sebagai kontribusi PDRB dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi.

A. BIDANG PERINDUSTRIAN

Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan di bidang perindustrian, dalam Dinas Parindustrian, Perdagangan Kota Blitar secara Tupoksi dilaksanakan oleh Bidang Industri dan ESDM. Pembinaan dan pengembangan di bidang industri yang dilakukan adalah kepada industri formal (industri yang telah memiliki legalitas usaha / ijin usaha industri) serta kepada industri non formal (industri rumah tangga yang tumbuh dari kelompok usaha maupun perorangan dan belum memiliki legalitas usaha / ijin usaha industri)

1. Perkembangan Industri

Perkembangan di bidang industri terus mengalami pertumbuhan, dimana setiap tahunnya bermunculan banyak industri non formal (rumah tangga) di berbagai wilayah Kota Blitar, baik berupa kelompok usaha industri maupun industri perorangan. Selain itu, perkembangan industri formal juga

mengalami tren yang terus naik. Dimana dengan adanya berbagai pembinaan dari Dinas perindustrian, Perdagangan, industri rumah tangga yang ada dapat meningkat menjadi industri kecil dengan adanya legalitas usaha berupa Tanda Daftar Industri (TDI).

Dengan berkembangnya sektor industri, maka hal ini juga berdampak pada adanya peningkatan dalam penyerapan tenaga kerja di sektor industri, berkembang pula jumlah investasi di sektor industri, seperti pada tabel berikut:

Perkembangan jumlah unit usaha, penyerapan tenaga kerja, peningkatan nilai investasi dan peningkatan nilai produksi di sektor industri seperti tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 2.3.1

Perkembangan pada Industri Formal

NO	PERKEMBANGAN	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Unit Usaha	118	121	122	130	135	132	137
2	Tenaga Kerja	3.077	3.165	3.972	4.018	4.052	3.708	3.753
3	Investasi (Rp.000)	12.766.644	13.456.006	13.822.306	16.039.691	16.302.861	24.170.249	39.435.949
4	Produksi (Rp.000)	298.485.129	297.859.478	299.691.351	257.974.051	258.117.751	294.832.451	305.555.651

*Sumber Data : Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar
Tahun 2018*

Tabel 2.3.2

Perkembangan pada Industri Non Formal

NO	PERKEMBANGAN	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Unit Usaha	1.893	1.981	1.988	2.198	2.244	4.613	4.643
2	Tenaga Kerja	4.154	4.236	4.115	4.408	4.234	8.519	8.682
3	Investasi (Rp.000)	5.580.020	5.745.740	5.672.640	7.572.240	7.133.590	33.322.020	34.710.984

4	Produksi (Rp.000)	82.563	85.810	86.003	104.471	88.753	387.90	417.22
		.017	.259	.286	.950	.660	6.114	6.492

Sumber Data : Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar

Tahun 2018

B. BIDANG PERDAGANGAN

Bidang Perdagangan menjadi salah satu sektor yang menjadi tupoksi dari Dinas perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar. Dalam bidang perdagangan, pembinaan yang dilakukan adalah melalui pembinaan dalam upaya peningkatan perdagangan melalui berbagai kegiatan diantaranya diselenggarakannya sosialisasi perlindungan konsumen, kemudahan dalam penerbitan rekomendasi ijin usaha.

B.1 Berikut rekapitulasi data di bidang perdagangan tahun 2011-2017 seperti pada tabel berikut:

Tabel 2.3.4

**Rekapitulasi Data Rekomendasi yang diterbitkan di Bidang
Perdagangan**

REKOMENDASI	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
SIUP	383	370	330	271	465	384	309
TDP	334	377	348	292	458	411	311
SIPTU PKL	340	365	352	243	161	104	120

Sumber Data : Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar

Tahun 2018

Tabel 2.3.5
Data UTTP Bertanda Tera Sah di Bidang Perdagangan

Tahun	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
UTTP	8.794	8.792	7.305	6.529	5.284	5.460	117

Sumber Data : Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar
Tahun 2018

Adapun prestasi – prestasi yang pernah diraih Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar pada tahun 2011 penghargaan UPAKARTI Tahun 2011 dari Kementerian Perindustrian Republik Indonesia di bidang Kerajinan Aneka Pisau

Tabel. 2.3.9
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar 2011-2015

No.	Kinerja sesuai tugas & fungsi SKPD	Indikator	Satuan	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
				1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	Peningkatan Daya Saing Industri melalui Peningkatan Promosi	Prosentase Peningkatan Realisasi Penanaman modal	%	0,35	0,40	0,40	0,45	0,45	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	1,42	1,25	1,25	1,11	1,11
		Peningkatan Jumlah Pelaku Usaha yang memiliki Sertifikasi HKI	%	25	25	26	27	29	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0
2	Peningkatan Ketersediaan Industri (Pelaku Usaha/IKM)	Pemutakiran Data Industri	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Peningkatan Daya Saing Industri Melalui Peningkatan Sumber Daya Manusia Tehnologi, Inovasi dan Standarisasi	Prosentase PDRB Sektor Industri	%	9	9,33	9,27	9,22	9,33	9	9,33	9,27	9,22	9,33	100	100	100	100	100
4	Peningkatan Perlindungan terhadap Konsumen	Prosentase UTTP yang telah ditera/tera ulang	%	10	15	20	25	30	54,1	54,1	68,4	50	50	5,4	3,6	3,45	2	1,66
5	Meningkatnya Informasi Perkembangan harga bahan pokok	Prosentase Peningkatan Jumlah Intensitas informasi harga kebutuhan bahan pokok	%	40	50	50	65	65	30	45	65	75	75	0,75	0,92	1,3	1,17	1,17
6	Meningkatnya Kesadaran pelaku usaha terhadap kewajiban kepengurusan perijinan SIUP, TDP, Siptu.	Prosentase peningkatan Jumlah rekomendasi perijinan SIUP, TDP, dan SIPTU	%	19,4	39,2	59	79,2	85	25	45	60	80	85	1,28	1,15	1,02	1,01	1
7	Meningkatnya fasilitasi sarana/prasarana bagi PKL	Prosentase Peningkatan jumlah PKL yang mendapatkan	Orang	480	480	500	500	500	480	480	500	500	500	100	100	100	100	100

		pembinaan																
8	Meningkatnya pemahaman masyarakat bahaya minuman beralkohol	Prosentase peningkatan jumlah masyarakat/pelajar yang telah memahami bahaya minuman beralkohol	%	18,5	37,8	57,8	78,5	86,5	27,5	45,6	69,8	88,4	95	1,48	1,21	1.21	1,13	1.1

Tabel 2.3.10

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar Tahun 2011-2015

Uraian	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
PENDAPATAN DAERAH	152.198.500	141.303.500		140.617.750	8.900.000	198.771.500	122.870.000		205.885.000	8.900.000	130,6	87,0	-	146,4	100,0	-33,8	1,1
Pendapatan Asli Daerah	152.198.500	141.303.500		140.617.750	8.900.000	198.771.500	122.870.000		205.885.000	8.900.000	-	-	-	-	-	-	-
Hasil Pajak Daerah	0	0		0	0	0	0		0	0	130,6	87,0	-	100,0	100,0	-33,8	-6,1
- Hasil Retribusi Daerah	152.198.500	141.303.500		140.617.750	8.900.000	198.771.500	122.870.000		140.617.750	8.900.000	-	-	-	-	-	-	-
- Hasil Pengelolaan Kekayaan	0	0		0	0	0	0		0	0	-	-	-	-	-	-	-
- Lain-lain PAD yang Sah	0	0		0	0	0	0		0	0	-	-	-	-	-	-	-
Dana Perimbangan	0	0		0	0	0	0		0	0	-	-	-	-	-	-	-
- Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	0	0		0	0	0	0		0	0	-	-	-	-	-	-	-
- Dana Alokasi Umum	0	0		0	0	0	0		0	0	-	-	-	-	-	-	-
- Dana Alokasi Khusus	0	0		0	0	0	0		0	0	-	-	-	-	-	-	-
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0	0		0	0	0	0		0	0	-	-	-	-	-	-	-
- Pendapatan Hibah	0	0		0	0	0	0		0	0	-	-	-	-	-	-	-
- Dana Darurat	0	0		0	0	0	0		0	0	102,6	95,9	-	67,3	80,4	21,9	-5,6
BELANJA DAERAH	4.150.746.279	5.155.051.961		7.359.883.413	7.260.100.807	4.258.143.039	4.943.703.900		4.949.816.401	5.837.644.025	112,1	94,9	-	97,7	97,0	11,1	-4,4
Belanja tidak langsung	1.438.579.979	1.976.509.161		1.823.885.599	1.887.542.259	1.612.817.534	1.874.764.992		1.781.208.841	1.831.191.128	108,9	95,0	-	95,8	97,1	7,4	-3,5
- Belanja Pegawai	1.772.488.579	2.531.072.911		2.031.367.599	2.012.406.259	1.929.629.534	2.403.554.492		1.946.464.841	1.953.157.128	-	-	-	-	-	-	-
- Belanja Bunga	0	0		0	0	0	0		0	0	-	-	-	-	-	-	-
- Belanja Subsidi	0	0		0	0	0	0		0	0	-	-	-	-	-	-	-

PERUBAHAN KEDUA RENSTRA 2016-2021

- Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
- Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
- Belanja Bagi Hasil Kepada provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
- Belanja Tidak Terduga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,5	96,6	-	57,2	81,4	29,5	0,1
Belanja Langsung	2.712.166.300	3.178.542.800	5.535.997.814	5.372.558.548	2.645.325.505	3.068.938.908	3.168.607.560	4.371.691.897	108,9	95,0	-	95,8	97,1	7,4	-3,5	
- Belanja Pegawai	1.772.488.579	2.531.072.911	2.031.367.599	2.012.406.258	1.929.629.534	2.403.554.492	1.946.464.841	1.953.157.128	97,9	96,8	-	55,3	72,6	34,8	-4,2	
- Belanja Barang dan Jasa	2.342.197.050	2.595.938.150	5.177.507.314	4.874.036.230	2.292.709.905	2.512.408.508	2.861.835.560	3.540.022.997	99,3	98,9	-	93,7	92,2	187,9	-2,4	
- Belanja Modal	36.060.650	28.040.900	151.008.500	373.658.318	35.803.600	27.740.900	141.516.000	344.463.900	-	-	-	-	-	-	-	
PEMBIAYAAN	0	0	-													
Penerimaan Pembiayaan										-	-	-	-	-	-	-
- Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
- Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
- Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
- Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
- Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
- Penerimaan Piutang Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
Pengeluaran Pembiayaan										-	-	-	-	-	-	-
- Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
- Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-

PERUBAHAN KEDUA RENSTRA 2016-2021

- Pembayaran Pokok Utang	0	0		0	0	0	0		0	0	-	-	-	-	-	-	
- Pemberian Pinjaman Daerah	0	0		0	0	0	0		0	0							
Total	4.302.944.779	5.296.355.461	0	7.500.501.163	7.269.000.807	4.456.914.539	5.066.573.900	0	5.155.701.401	5.846.544.025	130,6	87,0	-	146,4	100,0	-33,8	1,1

II.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPD

Strategi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar dalam pengembangan pelayanan yaitu dengan mengetahui faktor kunci keberhasilan yang berfungsi untuk lebih memfokuskan arah organisasi dalam rangka mencapai visi dan misi organisasi.

Arah tersebut dilakukan dengan cara menetapkan tujuan dan strateginya secara efektif dan efisien dengan mempertimbangkan faktor kunci tersebut.

Faktor-faktor kunci keberhasilan (critical succes factors) merupakan faktor-faktor yang sangat berperan dalam pencapaian keberhasilan organisasi dalam memberikan pelayanan publik. Faktor-faktor ini ditetapkan dengan terlebih dahulu menganalisis lingkungan internal dan eksternal, dalam rangka menentukan tingkat urgensi dan dampak serta penentuan skala prioritas

II.4.1 Kelemahan dan Kekuatan Internal

Analisis lingkungan internal pada dasarnya proses identifikasi yang menguraikan kekuatan dan kelemahan yang meliputi Struktur Organisasi, sumber daya manusia, pembiayaan, sarana dan prasarana. Analisis Lingkungan Internal dikelompokkan atas hal-hal yang merupakan kelemahan (weakness) atau kekuatan (strength) organisasi dalam mewujudkan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

Adapun kelemahan-kelemahan yang dimiliki Dinas Perdagangan dan Perindustrian diantaranya :

1. Belum dilakukannya analisis beban kerja pada setiap sub unit kerja sebagai bahan untuk analisis dan menentukan berapa kebutuhan pegawai tiap Bidang
2. Belum terpenuhinya proporsionalitas, kuantitas, kualitas, distribusi, dan komposisi SDM aparatur sesuai kebutuhan organisasi;
3. Kurangnya perencanaan, evaluasi/monitoring terhadap pelaksanaan Kegiatan yang ada;
4. Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang sesuai standar;
5. Lemahnya koordinasi antara bidang yang ada;
6. Belum optimalnya kualitas pelayanan baik di sektor perdagangan maupun perindustrian;

Sedangkan kekuatan-kekuatan yang dimiliki Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar diantaranya :

1. Memiliki struktur organisasi dan tupoksi yang jelas ;
2. Jumlah sumber daya manusia aparatur cukup memadai;
3. Adanya kejelasan pembagian kewenangan, kedudukan, tugas dan fungsinya berupa peraturan, pedoman, juklak, juknis pada setiap operasional kegiatan;
4. Tersedianya dana untuk menunjang kegiatan kegiatan Bidang Perdagangan dan Perindustrian:
5. Memiliki perencanaan strategis sebagai acuan dalam pelaksanaan tupoksinya ;
6. Adanya skala prioritas dalam program kerja;
7. Profesionalisme pegawai;
8. Kebijakan didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku;

II.4.2 Peluang dan Tantangan Eksternal

Analisis lingkungan eksternal pada dasarnya adalah identifikasi terhadap kondisi lingkungan luar organisasi yang menguraikan peluang dan tantangan/ancaman yang terdiri dari lingkungan ekonomi, teknologi, sosial budaya, politik, ekologi dan keamanan. Identifikasi ini akan menghasilkan indikasi mengenai peluang (opportunity) dan tantangan (threats) organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Analisis lingkungan eksternal menghasilkan peluang-peluang (Opportunities) dilingkungan Dinas Perdagangan dan Perindustrian diantaranya :

1. Tersedianya peluang usaha
2. Adanya peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan pada sektor perdagangan dan industri;
3. Adanya dukungan peraturan perundang-undangan yang memadai
4. Adanya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan prima

Selain itu analisa lingkungan eksternal mengingatkan kepada tantangan (treaths) Dinas Perdagangan dan Perindustrian kota Blitar diantaranya :

1. Krisis kepercayaan masyarakat kepada pemerintah

2. Sering terdapatnya perubahan produk hukum nasional
3. Persaingan yang makin ketat pada era globalisasi
4. Kebutuhan akan pelayanan di sektor Perdagangan dan Perindustrian yang lebih cepat, baik dan lebih murah sebagai perwujudan Governance

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Sebagaimana telah diidentifikasi dalam Renstra OPD, daya saing industri belum banyak berkembang karena dihadapkan pada berbagai masalah.

Permasalahan tersebut, antara lain: lemahnya penguasaan teknologi, rendahnya kualitas SDM, minimnya peran industri kecil menengah (IKM) dalam pengembangan iklim usaha dan investasi.

Permasalahan utama yang dihadapi sektor industri yaitu belum kokohnya didalam sektor industri menyangkut struktur industri yang belum kokoh dan berkeadilan merupakan akibat dari kebijakan industrialisasi yang bersifat broad-based (kegiatan yang dilakukan berdasar aspirasi masyarakat), sehingga industri pendukung belum terbangun selaras dengan kebutuhan industri hulu maupun hilir (hollow-middle).

Rendahnya daya saing industri kita juga dipengaruhi oleh masalah iklim usaha dan investasi yang ada seperti belum memadainya sumber daya manusia (SDM) Industri juga sarana dan prasarana, industri sehingga dapat berdampak pada meningkatnya biaya industri/produksi.

Masalah lain yang dihadapi adalah kapasitas infrastruktur yang masih terbatas, terutama untuk pemulihan ekonomi dan masih terdapat ketimpangan yang besar antar- daerah. Hal ini menyebabkan konsentrasi industri manufaktur daerah secara nasional sebagian besar masih berada di Jawa.

Adapun salah satu problem utama yang dihadapi Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan yaitu persoalan pembiayaan dan kondisi keuangan PD serta kualitas dan kuantitas hasil produksi.

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar sebagai instansi teknis dalam menjalankan tugas dan fungsinya bidang Perdagangan dan Perindustrian mengalami permasalahan permasalahan antara lain :

1. Rendahnya ketaatan pelaku usaha terhadap peraturan yang berlaku
2. Disparitas dan fluktuasi harga bahan pokok yang cukup tinggi
3. Rendahnya sarana dan prasarana pendukung perdagangan
4. Masih adanya kondisi bangunan pasar yang belum memenuhi standart
5. Rendahnya validitas data usaha, profil dan potensi perdagangan
6. Kapasitas sumberdaya manusia (SDM) dibidang industri masih rendah;
7. Kualitas dan kuantitas hasil produksi masih rendah sehingga tidak dapat bersaing dalam pasar baik regional, nasional maupun internasional
8. Rendahnya sarana dan prasarana pendukung industri dan perdagangan.
9. Belum optimalnya pemasaran produk hasil industri dan perdagangan;
10. Kurang memadainya jumlah tenaga yang menguasai teknologi informasi
11. Pemanfaatan anggaran yang ditujukan bagi masyarakat IKM umumnya kurang efektif dan kurang produktif sehingga belum berefek nyata terhadap peningkatan taraf hidup mereka.

3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL TERPILIH

Visi Kota Blitar 2016-2021 :

“ Masyarakat Kota Blitar Semakin Sejahtera melalui APBD Pro Rakyat pada Tahun 2021”

Misi Kota Blitar 2016-2021 :

1. Meningkatkan aktualisasi nilai-nilai religius dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Meningkatkan kualitas SDM yang cerdas dan berdaya saing tinggi.
3. Meningkatkan kemandirian ekonomi yang berorientasi pada industri pariwisata dan ekonomi kreatif yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan.

4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berbasis sistem pelayanan berkualitas dan partisipatif.
5. Meningkatkan keharmonisan sosial dengan semangat rukun agawe santoso.
6. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan professional.

Ditinjau dari sisi tugas dan fungsi, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar berkontribusi langsung dalam mendukung pencapaian misi ke 3, yaitu “Meningkatkan kemandirian ekonomi yang berorientasi pada industri pariwisata dan ekonomi kreatif yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan”.

3.3 TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PROVINSI

3.3.1. Renstra Kementerian Perdagangan RI 2015-2019

Dalam Rencana Strategis Kementerian Perdagangan periode 2015-2019 memiliki 3 (tiga) misi dalam membangun sektor perdagangan, yaitu:

1. Meningkatkan pertumbuhan kinerja perdagangan luar negeri yang berkelanjutan;
2. Meningkatkan perdagangan dalam negeri yang bertumbuh dan berkualitas; dan
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di sektor

Untuk mewujudkan Visi dan Misi pemerintahan periode 2015-2019 yang dijumpai melalui misi Kementerian Perdagangan, maka tujuan yang hendak dicapai dalam membangun sektor perdagangan periode 2015–2019 yaitu:

1. Peningkatan ekspor barang non migas yang bernilai tambah dan jasa;
2. Peningkatan pengamanan perdagangan;
3. Peningkatan akses dan pangsa pasar internasional;
4. Pemantapan promosi ekspor dan nation branding;
5. Peningkatan efektivitas pengelolaan impor barang dan jasa;
6. Pengintegrasian dan perluasan pasar dalam negeri;
7. Peningkatan penggunaan dan perdagangan produk dalam negeri (PDN);
8. Optimalisasi/penguatan pasar berjangka komoditi, SRG dan

9. pasar lelang;
10. Peningkatan kelancaran distribusi dan jaminan pasokan
11. barang kebutuhan pokok dan barang penting;
12. Peningkatan perlindungan konsumen;
13. Peningkatan iklim usaha dan kepastian berusaha;
14. Peningkatan kualitas kinerja organisasi;
15. Peningkatan dukungan kinerja perdagangan;
16. Peningkatan kebijakan perdagangan yang harmonis dan berbasis kajian;

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015–2019 telah menetapkan misi pembangunan nasional yang terkait langsung dengan sektor perdagangan antara lain, yaitu perdagangan sebagai sektor penggerak pertumbuhan dan daya saing ekonomi untuk kemakmuran rakyat yang berkeadilan. Arah kebijakan pembangunan Perdagangan Nasional ke depan secara konsisten akan mengacu kepada arah pembangunan dalam RPJMN 2015–2019. Arah ini merupakan pedoman dalam Rencana Strategis 2015–2019 Kementerian Perdagangan RI menyusun langkah-langkah strategis ke depan untuk mencapai sasaran yang diinginkan. Arah kebijakan perdagangan dapat dijabarkan menjadi 8 (delapan) pokok pikiran, yaitu:

1. Mengamankan pangsa ekspor di pasar utama
2. Memperluas pangsa pasar ekspor di pasar prospektif dan hub perdagangan internasional
3. Meningkatkan diversifikasi produk ekspor
4. Mengamankan pasar domestik untuk meningkatkan daya saing produk nasional
5. Meningkatkan aksesibilitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)
6. Meningkatkan perlindungan konsumen
7. Meningkatkan efisiensi sistem distribusi & logistik
8. Meningkatkan fasilitasi dan iklim usaha perdagangan

3.3.2. Renstra Kementerian Perindustrian RI 2015-2019

Dalam Renstra Kementerian Perindustrian RI memiliki Visi Pembangunan Industri tahun 2015 – 2019 adalah: “Indonesia Menjadi Negara Industri yang Berdaya Saing dengan Struktur

Industri yang Kuat Berbasis Sumber Daya Alam dan Berkeadilan”

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk 4 (empat) misi sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Perindustrian sebagai berikut:

1. Memperkuat dan memperdalam struktur Industri nasional untuk mewujudkan industri nasional yang mandiri, berdaya saing, maju, dan berwawasan lingkungan;
2. Meningkatkan nilai tambah di dalam negeri melalui pengelolaan sumber daya industri yang berkelanjutan dengan meningkatkan penguasaan teknologi dan inovasi;
3. Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;
4. Pemerataan pembangunan Industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional.

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi Pembangunan Industri, Kementerian Perindustrian menetapkan tujuan pembangunan industri untuk 5 (lima) tahun ke depan yaitu Terbangunnya Industri yang Tangguh dan Berdaya Saing.

Arah kebijakan umum pembangunan nasional 2015-2019 adalah :

1. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan
2. Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Tambah Sumber Daya Alam (SDA) yang Berkelanjutan
3. Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan
4. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, Mitigasi Bencana Alam dan Perubahan Iklim
5. Penyiapan Landasan Pembangunan yang Kokoh
6. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan
7. Mengembangkan dan Memeratakan Pembangunan Daerah

3.3.3 Renstra Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019

Visi pembangunan Jawa Timur yang ingin diwujudkan pada periode 2014-2019 adalah “ Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berdaya Saing dan Berakhlak “

Jawa Timur Lebih Berdaya Saing adalah terwujudnya peningkatan

kemampuan daya saing Jawa Timur, bukan hanya berdasarkan keunggulan komperatif (comparative advantage), tetapi terutama keunggulan kompetitif (competitive advantage), menyangkut peningkatan kualitas produk, manajemen produksi, pemasaran, dan akses permodalan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusausaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), khususnya menghadapi ASEAN Economic Community pada 2015. Di samping itu, Jawa Timur Lebih Berdaya daya Saing juga berkait terwujudnya peningkatan daya saing dan kemandirian budaya lokal menghadapi ASEAN Socio-Cultural Community pada 2015, agar tidak tergusur dan lenyap ditelan oleh integrasi sosio-kultural ASEAN, maupun budaya asing lainnya. Puncak-puncak kebudayaan daerah yang merupakan kebudayaan bangsa atau kebudayaan nasional harus terus dipelihara, diperkuat, dan dikembangkan agar karakter dan jati diri bangsa menjadi unggulan sebagai daya saing, dan karenanya tetap mampu berkepribadian dalam kebudayaan.

Misi yang terkait dengan urusan perdagangan dan perindustrian adalah misi kedua, yaitu “Meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan berdaya saing, berbasis agrobisnis/agroindustri, dan industrialisasi”. Apabila diuraikan dalam konteks pengembangan perindustrian dan perdagangan, misi kedua ini dapat dijelaskan dalam beberapa pokok pikiran berikut:

a. Pembangunan industri dan perdagangan yang inklusif.

Pembangunan yang inklusif adalah pembangunan yang tidak hanya bertumpu pada aspek pertumbuhan ekonomi saja, tetapi juga menitikberatkan pada aspek pemerataan dan efektifitas hasil pembangunan terhadap penciptaan lapangan kerja. Aspek pemerataan dan penciptaan lapangan kerja ini diwujudkan dalam prioritas pengembangan industri kecil dan menengah (IKM) dan pengembangan industri berbasis agro. Pengembangan IKM harus menjadi prioritas karena menyerap banyak tenaga kerja dan lebih dari 90 persen industri di Jawa Timur merupakan IKM. Pengembangan industri berbasis agro dimaksudkan agar industrialisasi memberikan dampak positif bagi sektor pertanian.

b. Pembangunan industri dan perdagangan yang mandiri

Pada bidang industri, kemandirian ekonomi diwujudkan dengan mengurangi ketergantungan industri terhadap bahan baku impor. Pada bidang perdagangan, kemandirian tersebut diupayakan melalui penguatan perdagangan dalam negeri melalui peningkatan kerjasama perdagangan dengan provinsi-provinsi lain melalui pembukaan Kantor Perwakilan Dagang (KPD). Sampai tahun 2013, telah dibuka 26 KPD di berbagai provinsi mitra.

a. Pembangunan industri dan perdagangan yang berdaya saing tinggi

Daya saing sektor industri dan perdagangan Jawa Timur harus terus ditingkatkan mengingat sistem ekonomi dunia yang semakin terintegrasi, baik pada tingkat regional maupun internasional. Dengan sistem yang terintegrasi, lalu lintas barang, jasa, dan tenaga kerja antarwilayah semakin tidak dapat dibatasi oleh hambatan-hambatan non-teknis. Keunggulan kompetitif dan komparatif dengan demikian menjadi kunci keberhasilan Jawa Timur dalam integrasi ekonomi global

3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS KOTA BLITAR

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan, kawasan industri belum membentuk suatu kawasan yang utuh. Lokasi industri cenderung mengelompok pada lingkungan perumahan dengan kerajinan hasil produksi yang serupa seperti kerajinan tangan, pengolahan pangan dan sebagainya. Luas kawasan industri Kota Blitar mencapai 10,19 Ha. Jumlah unit usaha industri pada tahun 2015 sebanyak 2.375 terdiri dari industri formal sebanyak 112 dan industri non formal 1.855 usaha. Jumlah tenaga kerja yang diserap sebesar 8.286 dimana 3.223 berada pada industri formal dan 4.148 pada industri non formal. Jumlah nilai investasinya sebesar Rp. 347.771.411.000,00 nilai investasi turun menjadi Rp. 21,010.818.000,00 dari data tersebut terlihat bahwa kinerja industri

kecil dan menengah di Kota Blitar pada Tahun 2010 sampai dengan 2015 menunjukkan peningkatan yang signifikan kecuali nilai produksi yang mengalami penurunan sebesar -5,59 %, hal ini disebabkan oleh tutupnya beberapa pabrik rokok

Industri komoditi andalan Kota Blitar adalah industri bubut kayu yang menghasilkan berbagai macam barang kerajinan dari kayu. Sentra industri kerajinan kayu terdapat di kecamatan Kepanjen Kidul dengan jumlah usaha sebanyak 212. sementara industri lain yang juga komoditi andalan Kota Blitar adalah industri makanan sambel pecel dan wajik kletik.

Sedangkan sentra industri untuk kerajinan batu onyx yang juga menjadi unggulan dari Kota Blitar terdapat di Jalan Sedap Malam dan Jalan Wilis Kota Blitar. Kerajinan batu onyx ini merupakan industri yang mengubah dari batu onyx mentah menjadi barang unik, seperti vas bunga, patung dan lainnya. Sentra industri sambel pecel terdapat di Jalan Cemara, Desa Karang Sari, Kecamatan Sukorejo Kota Blitar.

Dari rencana tata ruang wilayah hal –hal yang berkaitan dengan tupoksi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar fokus pembinaan diarahkan kepada para pelaku usaha yang bergerak di bidang industri kerajinan maupun makanan dan minuman yang merupakan komoditi andalan di Kota Blitar

3.4.1. Implikasi RTRW bagi pelayanan OPD

Dalam mengimplementasikan Rencana Tata Ruang Wilayah , Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.

Pada prinsipnya Dinas Perdagangan dan Perindustrian selalu sejalan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian lingkungan Hidup Strategis, karena dalam Penataan Tempat Dinas Perdagangan dan Perindustrian selalu berdasar rekomendasi dari Pemerintah Daerah, dan atau melaksanakan pemeliharaan/rehabilitasi pada lokasi yang sama, demikian pula dalam hal pembangunan fasilitas Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

3.4.2 Implikasi KLHS bagi pelayanan OPD

Dalam Implementasi Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar Tahun 2016 - 2021, terdapat 9 (Sembilan) isu berkelanjutan, yaitu: (1) belum optimalnya pembangunan daya saing infrastruktur; (2) alih fungsi lahan (hutan dan pertanian); (3) perubahan iklim; (4) penurunan kualitas dan kuantitas sumber daya alam; (5) bencana alam; (6) kesejahteraan rakyat;

Perubahan kondisi infrastruktur secara umum memberikan dampak terhadap semua penduduk Kota Blitar, karena infrastruktur merupakan barang publik murni dengan sifat non-excludable (tanpa ada larangan) dan non-rivalry (tanpa persaingan) dimana semua masyarakat memiliki hak yang sama dalam pemanfaatannya. Namun, secara khusus perubahan kondisi infrastruktur akan sangat berdampak kepada pihak-pihak yang bergerak pada sektor perekonomian seperti berikut:

- Investor penanam modal.
- Pelaku industri (besar, menengah, dan kecil).
- Pelaku industri pariwisata

3.5 PENENTUAN ISU – ISU STRATEGIS

Melihat Bab IV Rancangan Perubahan RPJMD Kota Blitar 2016 – 2021 sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar mempunyai permasalahan :

a. Perdagangan

KondisiPerdagangan:nampak (a) Masih banyaknya peredaran barang dan jasa yang belum terstandarisasi dan ada yang belum aman; (b) Standarisasi produk barang dan jasa dalam rangka penerapan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) dan peningkatan daya saing; (d) Masih belum optimalnya penataan PKL, (e) Masih banyaknya pasar rakyat (tradisional) yang memenuhi syarat dan standar kesehatan, kebersihan dan kenyamanan; (f) Terbatasnya kemampuan sumber daya manusia pelaku usaha UMKM sebagai pelaku usaha pasar rakyat; dan (g) Pertumbuhan pasar modern (minimarket) begitu pesat yang dapat mengancam pasar tradisonal. Pemerintah Kota Blitar dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk melakukan

penataan perkembangan dan dinamika perdagangan modern agar dapat berkontribusi dalam pertumbuhan perdagangan tradisional, pasar tradisional. Hal ini ditujukan selain untuk melindungi, mengembangkan, serta meningkatkan pedagang pasar tradisional serta menciptakan persaingan sehat dan membina lingkungan sosial yang kondusif.

b. Industri

Permasalahannya yang dihadapi bidang industri antara lain: (a) Masih rendahnya kinerja perindustrian yang diindikasikan dengan masih rendahnya rasio nilai ekspor terhadap PDRB; (b) Penguasaan teknologi pada IKM belum optimal; (c) Penurunan kontribusi sektor pertanian yang belum seimbang dengan kenaikan PDRB sektor industri; (d) Belum optimalnya pertumbuhan jumlah usaha; (e) Ketergantungan bahan baku impor yang tinggi; (f) Ketersediaan tenaga kerja yang berkualitas sesuai kebutuhan dunia usaha industri masih rendah.

Berdasarkan uraian di atas, selanjutnya di tentukan isu – isu strategis yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis. Isu – isu strategis dimaksud antara lain :

1. Pembinaan dan peningkatan kapasitas pelaku usaha perdagangan dan industri
2. Peningkatan pengawasan perdagangan khususnya pada pengawasan distribusi barang pokok dan penting serta pengawasan metrology legal
2. Pembangunan dan revitalisasi sarana dan prasaran pendukung perdagangan
4. Validasi data usaha, profil dan potensi perdagangan

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA BLITAR

A. TUJUAN

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) selain didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama urusan pemerintahan yang dilaksanakan perangkat daerah, juga mengacu pada rumusan tujuan pembangunan yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD .

Adapun rumusan tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) 2016 - 2021 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar, sebagai berikut :

**“ Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan
dan Industri ”**

B. SASARAN

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional dalam jangka waktu lima tahun mendatang. Berdasarkan rumusan tujuan yang telah ditetapkan tersebut, maka sasaran yang akan dicapai di dalam Rencana Strategis (Renstra) 2016-2021 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya pertumbuhan usaha perdagangan
2. Meningkatnya pengawasan Perdagangan
3. Meningkatnya produktivitas industri

Tabel 4.1.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar Tahun 2016

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	RUMUS PERHITUNGAN	TARGET KINERJA 2016	REALISASI 2016
1	2	3	4	5	6
1	TUJUAN : Meningkatnya Kontribusi Perindustrian terhadap Perekonomian	Prosentase Peningkatan Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	Nilai PDRB sektor perdagangan tahun n - Nilai PDRB sektor perdagangan tahun (n-1) / Nilai PDRB sektor perdagangan tahun (n-1) x 100%	3,6 %	12,96%
	SASARAN : Meningkatnya Perkembangan Industri Kecil Menengah terlatih	Prosentase IKM terlatih terhadap Jumlah IKM terdaftar	Jumlah IKM terlatih dibagi Jumlah Total IKM terdaftar x 100 %	9,63%	9,76%
2	TUJUAN : Meningkatnya Kontribusi Perdagangan terhadap perekonomian	Prosentase Peningkatan Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	Nilai PDRB sektor industri tahun n - Nilai PDRB sektor industri tahun (n - 1) / Nilai PDRB sektor industri tahun (n - 1) x 100%	5,7 %	9,92%
3	SASARAN : Meningkatnya kesadaran pelaku Usaha yang wajib tera/tera ulang	Prosentase kesadaran pelaku usaha yang wajib melakukan tera/tera ulang	Jumlah pelaku usaha yang melakukan tera/tera ulang Tahun (n) - Jumlah pelaku usaha yang melakukan tera/tera ulang tahun (n-1) dibagi Jumlah pelaku usaha yang melakukan tera/tera ulang tahun (n-1) x 100 %	37,72%	-2,40%
4	SASARAN : Meningkatnya penataan Pedagang Kakilima	Prosentase Pedagang Kakilima yang memiliki Ijin SIPTU	Jumlah pedagang kakilima (PKL) yang memiliki ijin tahun (n) dibagi Jumlah seluruh Pedagang Kakilima (PKL) tahun (n) x 100 %	28%	8,7 %
5	SASARAN : Meningkatnya kelancaran distribusi dan jaminan pasokan barang kebutuhan pokok	Stabilitas harga bahan pokok	Harga rata-rata Bahan Pokok dalam Tahun (n) - Harga Bahan Pokok awal Tahun dibagi Harga Bahan Pokok Tahun (n) X 100 %	<50 %	<50 %
6	TUJUAN : Meningkatnya Investasi Daerah	Nilai Investasi (Miliar Rupiah)	Jumlah nilai rupiah modal yang diinvestasikan oleh pelaku usaha	160 M	166,8 M

7	SASARAN : Meningkatnya Investasi PMDN	Prosentase peningkatan reali sasi nilai investasi	Jumlah nilai investasi tahun (n) - Jumlah nilai investasi tahun (n-1) dibagi Jumlah nilai investasi tahun (n-1) X 100 %	0,50%	4,83%
8	SASARAN : Meningkatnya produk hasil IKM yang memiliki sertifikasi HKI	Prosentase pe ningkatan jum lah produk IKM yang berser tifikasi HKI	Jumkah pelaku usaha yang memiliki sertifikasi HKI tahun(n) - Jumlah pelaku usha yang memiliki sertifikasi HKI tahun (n-1) dibagi Jumlah pelaku usaha yang memiliki sertifikasi HKI tahun (n-1) x 100 %	30%	21,4 %

Tabel 4.1.2

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar Tahun 2017-2018

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	RUMUS PERHITUNGAN	TARGET KINERJA 2017		REALISASI 2017
				2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7
1	TUJUAN : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan dan Industri	Persentase Peningkatan Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	{{nilai PDRB Sektor Perdagangan tahun n - nilai PDRB sektor Perdagangan tahun (n- 1)}/ Nilai PDRB Sektor Perdagangan Tahun (n-1)} x 100 %	11,00 %	11,20 %	Data belum tersedia
		Persentase Peningkatan Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	{{nilai PDRB Sektor Industri tahun n - nilai PDRB sektor Industri tahun (n-1)}/ Nilai PDRB Sektor Industri Tahun (n-1)} x 100 %	11,5 %	11,55 %	Data belum tersedia
2	SASARAN : Meningkatnya pertumbuhan usaha perdagangan	Persentase peningkatan jumlah usaha perdagangan	{{Jumlah usaha perdagangan tahun n - Jumlah usaha tahun (n-1)}/ Jumlah usaha tahun (n-1)} x 100 %	5%	5,10%	5 %
3	SASARAN : Meningkatnya pengawasan Alat UTTP	Persentase jumlah alat UTTP bertanda tera sah	(Jumlah alat UTTP bertanda tera sah / Jumlah alat UTTP yang ada) x 100 %	11%	30%	0,95 %
4	SASARAN : Meningkatnya produktivitas industri	Persentase peningkatan nilai produksi industri	{{Jumlah nilai produksi industri tahun n - Jumlah nilai produksi industri tahun (n-1)}/ Jumlah nilai produksi industri tahun (n-1)} x 100 %	0,25	0,3%	5,87 %

Tabel 4.1.3

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar 2019-2021

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	RUMUS PERHITUNGAN	TARGET KINERJA 2017		
				2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	11
1	TUJUAN : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan dan Industri	Persentase Peningkatan Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	$\{(\text{nilai PDRB Sektor Perdagangan tahun } n - \text{nilai PDRB sektor Perdagangan tahun } (n-1)) / \text{Nilai PDRB Sektor Perdagangan Tahun } (n-1) \} \times 100 \%$	11,30 %	11,40 %	11,50 %
		Persentase Peningkatan Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	$\{(\text{nilai PDRB Sektor Industri tahun } n - \text{nilai PDRB sektor Industri tahun } (n-1)) / \text{Nilai PDRB Sektor Industri Tahun } (n-1) \} \times 100 \%$	11,6 %	11,65 %	11,7 %
2	SASARAN : Meningkatnya pertumbuhan usaha perdagangan	Persentase peningkatan volume usaha perdagangan	$\{(\text{volume usaha perdagangan tahun } n - \text{volume usaha tahun } (n-1)) / \text{volume usaha tahun } (n-1) \} \times 100 \%$	1,25%	1,5%	1,75%
3	SASARAN : Meningkatnya pengawasan perdagangan	Persentase peningkatan pengawasan perdagangan	$\{(\text{Jumlah pedagang yang diawasi (UTTP, BDKT, Minol dan Rokok Ilegal) tahun } n - \text{Jumlah pedagang yang diawasi (UTTP, BDKT, Minol dan Rokok Ilegal) tahun } (n-1)) / \text{Jumlah pedagang yang diawasi (UTTP, BDKT, Minol dan Rokok Ilegal) tahun } (n-1) \} \times 100 \%$	5 %	7,5 %	10 %
4	SASARAN : Meningkatnya produktivitas Industri	Persentase peningkatan nilai produksi Industri	$\{(\text{Jumlah nilai produksi industry tahun } n - \text{Jumlah nilai produksi Industry tahun } (n-1)) / \text{Jumlah nilai produksi Industry tahun } (n-1) \} \times 100 \%$	0,35%	0,4%	0,45%

BAB V**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan diperlukan strategi yang memuat cara-cara dalam mewujudkan tujuan yang dirancang secara konseptual, analitis, realitis, rasional dan komprehensif. Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana perangkat daerah menciptakan nilai tambah bagi stakeholder layanan.

Strategi dirumuskan dengan mempertimbangkan isu-isu strategis pembangunan daerah yang harus diselesaikan selama 5 tahun kedepan. Strategi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor internal dan eksternal yang berada di dalam lingkungan pembangunan sektor Perdagangan dan Perindustrian di Kota Blitar. Adapun Strategi tersebut adalah :

1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas perdagangan
2. Mengintensifkan pengawasan dan penertiban terhadap peredaran produk dalam negeri yang tidak memenuhi ketentuan.
3. Pengembangan Industri Kecil dan Menengah yang lebih kreatif, inovatif, tangguh, berdaya saing serta ramah lingkungan;

Untuk mengimplementasikan strategi dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, maka perlu dirumuskan kebijakan-kebijakan yang menjadi pedoman bagi perumusan dan operasionalisasi program lima tahun dari renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian, kebijakan tersebut adalah :

1. Pengembangan perdagangan yang mampu mendorong distribusi barang dan jasa, dan pengembangan produk-produk unggulan lokal yang mampu meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha serta masyarakat.
2. Revitalisasi pasar tradisional
3. Menginventarisir data kelembagaan usaha perdagangan guna menciptakan penataan dan penertiban para pelaku usaha kecil dan menengah

4. Menyediakan sistem informasi harga bahan pokok agar konsumen dapat memperoleh informasi yang baik dan akurat tentang perkembangan harga barang dan jasa yang beredar di pasar modern maupun di pasar tradisional.
5. Meningkatkan pengawasan perdagangan yang lebih menitik beratkan pada pengawasan alat Ukur, Timbang, Takar dan Peralatannya (UTTP)
6. Mengembangkan sektor industri yang dapat menciptakan struktur ekonomi yang kuat dengan menggunakan teknologi tepat guna serta memanfaatkan sumber daya lokal yang ada sehingga mempunyai value added dan meningkatkan daya beli masyarakat

**Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

VISI : Masyarakat Kota Blitar Semakin Sejahtera melalui APBD Pro Rakyat pada Tahun 2021			
MISI III : Meningkatkan kemandirian ekonomi yang berorientasi pada industri pariwisata dan ekonomi kreatif yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan dan Industri	Meningkatnya pertumbuhan usaha perdagangan	Meningkatkan kuantitas dan kualitas perdagangan	Pengembangan perdagangan yang mampu mendorong distribusi barang dan jasa, dan pengembangan produk-produk unggulan lokal yang mampu meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha serta masyarakat
			Revitalisasi pasar tradisional
	Meningkatnya pengawasan Perdagangan	Mengintensifkan pengawasan dan penertiban terhadap peredaran produk dalam negeri yang tidak memenuhi ketentuan	Meningkatkan pengawasan perdagangan yang lebih menitik beratkan pada pengawasan alat Ukur, Timbang, Takar dan Peralatannya (UTTP), Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT), Minuman Beralkohol dan Rokok yang dilekati pita cukai ilegal

			Menyediakan sistem informasi harga bahan pokok agar konsumen dapat memperoleh informasi yang baik dan akurat tentang perkembangan harga barang dan jasa yang beredar di pasar modern maupun di pasar tradisional
	Meningkatnya produktivitas industri	Pengembangan Industri Kecil dan Menengah yang lebih kreatif, inovatif, tangguh, berdaya saing serta ramah lingkungan;	Mengembangkan sektor industri yang dapat menciptakan struktur ekonomi yang kuat dengan menggunakan teknologi tepat guna serta memanfaatkan sumber daya lokal yang ada sehingga mempunyai value added dan meningkatkan daya beli masyarakat
			Terjalinnnya hubungan yang harmonis antara pengusaha perdagangan yang handal dengan pengusaha IKM

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dipaparkan dalam tabel di bawah ini :

TABEL 6.1.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KOTA BLITAR TAHUN 2016

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data capaian Tahun 2015	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2016	Lokasi
							2016		2016			
							Kinerja	Rp (Ribuan)	Kinerja	Rp (Ribuan)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	23
Meningkatkan kontribusi perindustrian terhadap perekonomian	Meningkatnya Perkembangan IKM terlatih	Prosentase IKM terlatih terhadap jumlah IKM terdaftar	2.07.01.16	PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH	Prosentase Jumlah Industri Kecil menengah yang berkembang	3%	3,60%	1.594.859,350	11,36 %	1.869.234.538	Disperindag	Kota Blitar
			2.07.01.16.10	Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku Industri hasil tembakau di bidang Perindustrian	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	13 KEG	15 Keg	1.594.859,350	15 Kegiatan	1.869.234.538		
Meningkatkan Kontribusi Perdagangan terhadap Perekonomian	Meningkatnya kesadaran pelaku usaha yang wajib tera/tera ulang	Prosentase Kesadaran pelaku usaha yang wajib melakukan tera/tera ulang	2.06.207.01.15	PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN	Persentase jumlah pemilik UTP yang dibina	30%	37,70%	333.865,000	85 %	287.047.609	Disperindag	Kota Blitar

PERUBAHAN KEDUA RENSTRA 2016-2021

			2.06.2.07.01.15.03	Peningkatan Pengawasan Peredaran barang dan Jasa	Frekuensi Sosialisasi bahaya minuman beralkohol Jumlah pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol	4 kali	5 kali	187.272,600	5 kali	122.768.400	Disperindag	Kota Blitar		
			2.06.2.07.01.15.05	Koordinasi Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen	Pembinaan Pemilik UTTP	0	0	146.592,400	4 kali	164.279.209	Disperindag	Kota Blitar		
					Pengawasan BDKT	4 kali	4 kali		4 kali				Kota Blitar	
					Tera/Tera ulang/Ukur Ulang	5830 UTTP	5830 UTTP		5460 UTTP					Kota Blitar
					Pengawasan Barang Beredar	6 kali	6 kali		6 kali					Kota Blitar
			2.06.2.07.01.21	PROGRAM PEMBERANTASAN BARANG KENA CUKAI ILEGAL (PERDAGANGAN)	Persentase pelanggar barang kena cukai ilegal	0%	0%	41.661,600	0 %	25.918.600	Disperindag	Kota Blitar		
			2.06.2.07.01.21.01	Pengumpulan Informasi hasil tembakau yang dilekati pita Cukai Palsu	Terlaksananya penyuluhan dan pengumpulan informasi penjual rokok yang dilekati pita cukai palsu	30 kali	30 kali	41.661,600	28 kali	25.918.600	Disperindag	Kota Blitar		
	Meningkatnya penataan pedagang kaki 5	Prosentase Pedagang K5 yang memiliki ijin SIPTU	2.06.2.07.01.19	PROGRAM PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DAN ASONGAN	Prosentase PKL dan asongan yang dibina	2,20%	2,56%	133.081,500	35,04 %	105.219.213				
			2.06.2.07.01.19.01	Pembinaan organisasi pedagang kaki lima dan asongan	Terlaksananya pembinaan dan fasilitasi tim koordinasi pengelolaan dan penataan PKL Terlaksananya	4 kali	4 kali	133.081,500	4 kali	105.219.213	Disperindag	Kota Blitar		

PERUBAHAN KEDUA RENSTRA 2016-2021

					fasilitasi sarana PKL berupa gerobak, terpal, tenda, etalase							
	Meningkatnya kelancaran distribusi dan jaminan pasokan barang ke kebutuhan pokok	Stabilitas harga bahan pokok	2.06.2.07.01.18	PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	Persentase peningkatan jumlah harga bahan pokok	13%	13,3%	84.133,450	13,3 %	77.572.083		
			2.06.2.07.01.18.03	Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk	Informasi harga dan stok bahan pokok	448 kali	448 kali	84.133,450	448 kali	77.572.083		
Meningkatnya Investasi Daerah	Meningkatnya Investasi PMDN	Prosentase peningkatan realisasi nilai investasi	1.16.2.07.01.15	PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI	Persentase peningkatan kerjasama investasi	0%	0,50%	1.761.209,200	0,4 %	2.082.354.547	Disperindag	Kota Blitar
			1.16.2.07.01.15.02	Pengembangan Potensi Unggulan Daerah	Terselenggaranya pameran/promosi produk khas Kota Blitar didalam maupun diluar negeri	30 kali	33 kali	1.761.209,200	33 kali	2.082.354.547	Disperindag	Kota Blitar
			2.07.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Prosentase Pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100 %	12 Bln	272.923,650	100 %	270.061.852	Disperindag	Kota Blitar
			2.07.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Surat Menyurat yang Tersedia	3 Jenis	3 Jenis	1.925,000	3 Jenis	1.218.650	Disperindag	Kota Blitar
			2.07.01.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Frekuensi pembayaran rekening telepon, air listrik dan internet	3 rekening, 12 bulan	3 rekening, 12 bulan	36.802,500	3 rekening, 12 bulan	28.649.408	Disperindag	Kota Blitar

PERUBAHAN KEDUA RENSTRA 2016-2021

			2.07.0 1.01.0 6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan dinas/Operasional	Frekuensi pembayaran pajak pajak kendaraan	3 Mobil 8 sepeda motor	3 Mobil 8 sepeda motor	5.950,000	12 Unit	1.200.000	Disperindag	Kota Blitar
			2.07.0 1.01.0 8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Frekuensi pembayaran jasa kebersihan kantor	12 bulan	12 bulan	2.400,000	12 bulan	32.931.050	Disperindag	Kota Blitar
			2.07.0 1.01.1 0	Penyediaan Alat tulis Kantor	Prosentase Pemenuhan ATK	65 macam	65 macam	34.133,900	65 macam	25.029.700	Disperindag	Kota Blitar
			2.07.0 1.01.1 1	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Prosentase pemenuhan barang cetakan dan penggandaan	7 jenis cetak 3 macam foto copy	7 jenis cetak 3 macam foto copy	25.030,900	7 jenis cetak 3 macam foto copy	5.260.800	Disperindag	Kota Blitar
			2.07.0 1.01.1 2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Prosentase pemenuhan komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor	10 macam	10 macam	5.561,000	10 macam	6.190.000	Disperindag	Kota Blitar
			2.07.0 1.01.1 3	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Prosentase pemenuhan peralatan dan perlengkapan kantor	5 Jenis	5 Jenis	10.362,500	4 jenis	8.995.550	Disperindag	Kota Blitar
			2.07.0 1.01.1 4	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Prosentase pemenuhan peralatan rumah tangga	12 bulan	12 bulan	13.455,850	12 bulan	3.105.000	Disperindag	Kota Blitar
			2.07.0 1.01.1 5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	2 koran 1 majalah	2 koran 1 majalah	3.380,000	2 koran 1 majalah	5.423.000	Disperindag	Kota Blitar
			2.07.0 1.01.1 7	Penyediaan Makanan dan Minuman	Prosentase penyediaan makanan dan minuman rapat dan tamu	12 bulan	12 bln	10.750,000	12 bulan	3.225.900	Disperindag	Kota Blitar

PERUBAHAN KEDUA RENSTRA 2016-2021

			2.07.0 1.01.1 8	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Jumlah rapat, konsultasi dan koordinasi ke dalam dan luar daerah	12 bulan	12 bulan	123.172,000	12 bulan	148.832.794	Disperindag	Kota Blitar
			2.07.0 1.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	12 Bln	377.719,550	119 %	202.739.783	Disperindag	Kota Blitar
			2.07.0 1.02.1 1	Penyediaan Perlengkapan Gedung Kantor	Prosentase Pemenuhan Perlengkapan Gedung Kantor	12 bln	1 paket	25.170,000	12 bln	25.170.000	Disperindag	Kota Blitar
			2.07.0 1.02.1 1	Penyediaan Peralatan Gedung Kantor	Prosentase Pemenuhan Peralatan Gedung Kantor	12 Bln	1.paket	21.295,000	12 Bln	23.279.088	Disperindag	Kota Blitar
			2.07.0 1.02.1 1	Pengadaan Mebelair	Prosentase Pemenuhan Mebelair	12 bulan	1 paket	41.580,000	12 bulan	36.543.000	Disperindag	Kota Blitar
			2.07.0 1.02.2 9	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair	Prekuensi Pemeliharaan Rutin Berkala Mebelair	12 bulan	1 paket	13.885,000	12 bulan	12.710.000	Disperindag	Kota Blitar
			2.07.0 1.02.2 4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Perawatan kendaraan dinas/operasional	3 mobil, 8 sepeda motor	3 mobil, 8 sepeda motor	78.323,750	19 Unit	39.988.595	Disperindag	Kota Blitar
			2.07.0 1.02.3 0	Pemeliharaan rutin/Berkala Perlengkapan Kantor	Prekuensi Pemeliharaan Rutin Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	1 tahun	1 paket	8.127,900	1 paket	5.090.100	Disperindag	Kota Blitar
			2.07.0 1.02.3 0	Pemeliharaan rutin/Berkala Peralatan Kantor	Prekuensi Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Gedung Kantor	1 Tahun	1 paket	11.672,900	1 paket	9.539.000	Disperindag	Kota Blitar

PERUBAHAN KEDUA RENSTRA 2016-2021

				Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Frekuensi pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	4 kali	4 kali	50.660.000	3 kali	50.420.000		
			2.07.0 1.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Prosentase ketersediaan dokumen perencanaan	100%	1 tahun	28.550,000	89 %	24.942.000	Disperindag	Kota Blitar
			2.07.0 1.06.0 1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Prosentase terpenuhinya dokumen LAKIP, LPPD, LKPJ, SOP, SPP, IKM, Evaluasi RENJA, Evaluasi RENSTRA, SPIP, SPM	10 kegiatan	10 kegiatan	10.684,000	7 kegiatan	3.257.000	Disperindag	Kota Blitar
			2.07.0 1.06.0 2	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tersusunnya NERACA, LRA, CALK	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3.292,000	2 Kegiatan	14.160.000	Disperindag	Kota Blitar
			2.07.0 1.06.0 2	Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran	Prosentase terpenuhinya penyusunan perencanaan RENJA, RENSTRA, RKA, DPA, P-RKA, P-DPA	5 Kegiatan	5 Kegiatan	14.574,000	5 Kegiatan	7.525.000	Disperindag	Kota Blitar
			2.07.0 1.18	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Prosentase Kegiatan yang dipublikasikan	50%	12 Bln	86.325,000	100	83.100.000	Disperindag	Kota Blitar

PERUBAHAN KEDUA RENSTRA 2016-2021

			2.07.0 1.18.0 1	Fasilitasi Keperansertaan Pada Event Daerah dan Hari Hari Besar Nasional	Terlaksananya peran serta dinas pada Hari jadi Kota Blitar Grebeg Pancasila Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI	6 Kali Kegiatan	6 Kali Kegiatan	59.575,000	6 kali	57.100.000	Disperindag	Kota Blitar
			2.07.0 1.18.0 2	Penyebarluasan Informasi Program/Kegiatan SKPD	Terlaksananya publikasi informasi SKPD	12 Bln	12 Bln	26.750,000	12 Bulan	26.000.000	Disperindag	Kota Blitar

Tabel 6.1.2 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah 2017

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
							2017		2017			
							Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.		
1	3	4	5	6	7	8	11	12		23	24	
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan dan Industri	Meningkatnya pertumbuhan usaha perdagangan	Persentase peningkatan jumlah usaha perdagangan	2.06.2.06.0 1.16	PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	Persentase usaha yang memperoleh fasilitas pengembangan kapasitas	4,8	4,8	815.118,30	4,8	2.755.395.900	Disperdagin	Kota Blitar
			2.06.2.06.0 1.16.03	Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk	Jumlah sarana perdagangan yang disediakan	1 jenis	3 jenis	815.118.300	3	2.755.395.900	Disperdagin	Kota Blitar
			2.06.2.06.0 1.17	PROGRAM PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DAN ASONGAN	Persentase pedagang kaki lima dan asongan yang dibina	33	66	211.751.700	65,69	176.697.200	Disperdagin	Kota Blitar
			2.06.2.06.0 1.17.01	Pembinaan organisasi pedagang kaki	Pembinaan/Penyuluhan/Motivasi Kerja bagi PKL	480 orang	500 orang	211.751.700	250	176.697.200	Disperdagin	Kota Blitar

PERUBAHAN KEDUA RENSTRA 2016-2021

				lima dan asongan								
					Jumlah PKL yang didata	1300	1500		650			
			2.06.2.06.0 1.20	PROGRAM PENGEMBANGAN PASAR DAERAH	Presentase sarana prasarana perdagangan dalam kondisi baik	55	55	2.165.207.000	55	1.559.627.600	Disperdagin	Kota Blitar
			2.06.2.06.0 1.20.01	Revitalisasi Pasar Tradisional	Jumlah bangunan pasar yang direvitalisasi	5	6	2.165.207.000	5	1.559.627.600	Disperdagin	Kota Blitar
	Meningkatnya pengawasan alat UTPP	Persentase jumlah alat UTPP bertanda tera sah	2.06.2.06.0 1.15	PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN	Persentase jumlah alat UTPP yang sudah ditera/tera ulang	61,40%	11	357.160,800	0,92	487.408.950	Disperdagin	Kota Blitar
			2.06.2.06.0 1.15.01	Koordinasi Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen	Fasilitasi alat UTPP yang ditera/tera ulang	630	630	334.874.700	117	263.075.950	Disperdagin	
			2.06.2.07.0 1.15.03	Peningkatan Pengawasan Peredaran barang dan Jasa	Peningkatan Jumlah masyarakat/pelajar yang telah memperoleh sosialisasi tentang bahaya minuman beralkohol	625 Orang	650 Orang	257.815.200	1680	224.333.000	Disperdagin	Kota Blitar
			2.06.2.06.0 1.18	PROGRAM PEMBERANTASAN BARANG KENA CUKAI ILEGAL (PERDAGANGAN)	Persentase pelanggar barang kena cukai ilegal	0	0%	41.661,600	0	18.278.200	Disperindag	Kota Blitar

PERUBAHAN KEDUA RENSTRA 2016-2021

			2.06.2.06.0 1.18.01	Pengumpulan Informasi hasil tembakau yang dilekati pita Cukai Palsu	Pengumpulan Informasi Cukai Rokok Ilegal	448 Pedagan g	483 Pedagang	41.661,600	548	18.278.200	Disperdagin	Kota Blitar
Meningkatn ya produktivita s IKM	Persentase peningkatan nilai produksi IKM	2.07.2.06.0 1.15	PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH	Persentase Pertumbuhan jumlah IKM		-0,74	2	1.650.102.500	0,74	1.262.308.35 0	Disperdagin	Kota Blitar
		2.07.2.06.0 1.15.01	Fasilitasi Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Jumlah industri kecil yang difasilitasi			2375	69.900,000	2375	68.535.000	Disperdagin	Kota Blitar
		2.07.01.16. 10	Pembinaan Industri Kecil dan Menengah dalam memperkuat jaringan klaster Industri	Jumlah industri kecil yang dibina	80	80	1.580.202,500	80	1.193.773.35 0	Disperdagin	Kota Blitar	
			PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL (DBHCHT) BIDANG PERINDUSTRIAN	Persentase Industri Kecil Terlatih	6	6,0	1.719.088.760	16	1.903.107.14 8	Disperdagin	Kota Blitar	
			Pembinaan dan Pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat	Jumlah industri kecil yang dilatih	.0	235	1.719.088.760	920	1.903.107.14 8	Disperdagin	Kota Blitar	
		2.06.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100 %	100 %	1.374.519.150	100	1.260.191.733	Disperdagin	Kota Blitar	

PERUBAHAN KEDUA RENSTRA 2016-2021

			2.06.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang terbayarkan	3 rekening, 12 bulan	132 rekening	60.000.000	12	85.737.956	Disperdagin	Kota Blitar
			2.06.01.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan dinas/Operasional	Jumlah unit kendaraan dinas yang terbayarkan pajaknya	3 Mobil 8 sepeda motor	11 unit	6.500.000	11	3.086.800	Disperdagin	Kota Blitar
			2.06.01.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jasa kerja petugas kebersihan dan keamanan	12 bulan	45 orang	1.079.400.000	45	930.549.000	Disperdagin	Kota Blitar
			2.06.01.01.10	Penyediaan Alat tulis Kantor	Jumlah jenis ATK yan terpenuhi	65 macam	36 jenis	27.977.550	36	28.156.650	Disperdagin	Kota Blitar
			2.06.01.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi	7 jenis cetak 3 macam foto copy	2 jenis	31.209.200	4	44.973.500	Disperdagin	Kota Blitar
			2.06.01.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listri/penerangan bangunan kantor yang terpenuhi	10 macam	5 jenis	2.055.400	7	4.983.900	Disperdagin	Kota Blitar
			2.06.01.01.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang tersedia	12 bulan	22 jenis	12.010.100	22	11.961.750	Disperdagin	Kota Blitar
			2.06.01.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang tersedia dalam satu tahun	2 koran 1 majalah	2 jenis	5.250.000	2	3.500.000	Disperdagin	Kota Blitar

PERUBAHAN KEDUA RENSTRA 2016-2021

			2.06.01.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah paket mamin yang tersedia	12 bulan	12 paket	15.640.200	12	14.800.000	Disperdagin	Kota Blitar
			2.06.01.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi regional dan nasional yang diikuti	12 bulan	12 bulan	132.551.700	12	132.442.177	Disperdagin	Kota Blitar
			2.06.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100 %	149.633.100	100	169.336.600	Disperdagin	Kota Blitar
			2.06.01.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang terpenuhi	12 bln	4 jenis	7.469.200	4	12.605.000	Disperdagin	Kota Blitar
			2.06.01.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah pemenuhan peralatan gedung kantor	12 Bln	2 unit	25.119.700	2	23.830.000	Disperdagin	Kota Blitar
			2.06.01.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	12 bulan	1 unit	19.734.200	1	79.395.000	Disperdagin	Kota Blitar
			2.06.01.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasiona 1	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	3 mobil, 8 sepeda motor	3 unit	44.830.000	3	34.646.600	Disperdagin	Kota Blitar
			2.06.01.02.26	Pemeliharaan rutin/Berkala Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	1 tahun	9 unit	4.900.000	9	12.960.000	Disperdagin	Kota Blitar

PERUBAHAN KEDUA RENSTRA 2016-2021

			2.06.01.02.28	Pemeliharaan rutin/Berkala Peralatan gedung Kantor	Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang terpelihara	1 Tahun	1 unit	6.000.000	1	5.900.000	Disperdagin	Kota Blitar
			2.06.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan	100%	100 %	23.292.000	110	19.995.000	Disperdagin	Kota Blitar
			2.06.01.06.02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tersusunnya NERACA, LRA, CALK	3 Kegiatan	3 dokumen	3.292,000	5	9.999.000	Disperdagin	Kota Blitar
			2.06.01.06.05	Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran	Jumlah jenis dokumen yang tersusun	5 Kegiatan	5 doumen	10.000.000	6	9.996.000	Disperdagin	Kota Blitar
			2.06.01.07	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Prosentase Kegiatan yang dipublikasikan	50%	12 Bln	60.000.000	100	57.000.000	Disperdagin	Kota Blitar
			2.06.01.07.11	Fasilitasi Keperansertaan Pada Event Daerah dan Hari Hari Besar Nasional	Jumlah even daerah dan hari besar nasional yang diikuti	6 Kali Kegiatan	3 event	50.000.000	3	50.000.000	Disperdagin	Kota Blitar
			2.06.01.07.12	Penyebarluasan Informasi Program/Kegiatan SKPD	Jumlah penyebarluasan informasi program/kegiatan PD	12 Bln	2 kali	10.000.000	2	7.000.000	Disperdagin	Kota Blitar

**Tabel. 6.1.3. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN
INDIKATIF DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA BLITAR TAHUN 2018**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Rp. 000)		Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
							2018			
							Target	Rp. (ribuan)		
1	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14
Meningkatkan Kontribusi Perdagangan Terhadap Perekonomian	Meningkatnya pertumbuhan usaha perdagangan	Persentase peningkatan jumlah usaha perdagangan	3.06.01.06	Program Pengembangan Dan Penguatan Perdagangan	Persentase usaha yang memperoleh fasilitas pengembangan kapasitas	4,50%	5%	3.175.000	Disperdagin	
				3.06.01.06.01	Pembinaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Jumlah pedagang kaki lima dan asongan yang dibina	480 orang	500 orang	300.000	Disperdagin
			3.06.01.06.02	Pengembangan dan Pembinaan Usaha Perdagangan	Jumlah PKL yang didata	1300	2000			
					Jumlah Usaha Perdagangan yang Dibina	480	500	2.875.000	Disperdagin	
					Jumlah unit usaha yang didata	0	10.000		Disperdagin	Kota Blitar
			Jumlah Unit Sarpras Perdagangan non Pasar yang Difasilitasi	0	2 Unit					

PERUBAHAN KEDUA RENSTRA 2016-2021

			3.06.01.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PASAR TRADISIONAL	Persentase Pasar dalam Kondisi Baik	55%	60%	3.785.000	Disperindag	Kota Blitar
			3.06.01.07.01	Pembangunan dan Revitalisasi Pasar Tradisional	Jumlah Bangunan Pasar yang dibangun dan direvitalisasi	3	4	3.785.000	Disperdagangan	Kota Blitar
			3.06.01.09	PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL (DBHCHT) BIDANG PERDAGANGAN	Jumlah Kontak Dagang dengan Daerah Lain	1	4	650.000		
			3.06.01.09.01	Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat di Bidang Perdagangan	Jumlah Promosi Perdagangan	0	2 kali	650.000		
	Meningkatnya Pengawasan Alat UTTP	Persentase Jumlah Alat UTTP Bertanda Tera Sah	3.06.01.05	PROGRAM PENGAWASAN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN	Persentase Alat UTTP yang ditera/tera ulang	8%	30%	4.315.920		
			3.06.01.05.01	Operasionalisasi dan Pengaturan Pengembangan Kemetrolgian Daerah	Jumlah Alat UTTP yang ditera/ tera Ulang	5.000	5.000	3.850.000	Disperdagangan	Kota Blitar
					Tersedianya Gedung Metrologi dan Peralatannya	-	1 Paket		Disperdagangan	

PERUBAHAN KEDUA RENSTRA 2016-2021

			3.06.01.05.02	Peningkatan Pengawasan Peredaran Kebutuhan Barang Pokok, Penting dan Minuman Beralkohol	Informasi Harga dan Stok Bahan Pokok	550 kali	553 Kali	465.920		
					Jumlah masyarakat/pelajar yang telah memperoleh sosialisasi tentang bahaya minuman beralkohol	625 Orang	675 Orang		Disperdagangan	Kota Blitar
			3.06.01.08	PROGRAM PEMBERANTASAN BARANG KENA CUKAI ILEGAL (PERDAGANGAN)	Persentase Pelanggar Barang Kena Cukai Ilegal	0%	0%	41.611		
			3.06.01.08.01	Pengumpulan Informasi hasil tembakau yang dilekati pita Cukai Palsu	Jumlah Pengumpulan Informasi Cukai Rokok Ilegal		553 Pedagang	41.611	Disperdagangan	Kota Blitar
Meningkatkan Kontribusi Perindustrian Terhadap Perekonomian	Meningkatnya produktivitas Industri	Persentase peningkatan nilai produksi IKM	3.07.01.05	PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH	Persentase Pertumbuhan jumlah IKM	2,50%	1,00%	1.815.000	Disperindag	Kota Blitar
			3.07.01.05.01	Pembinaan Industri Kecil dan Menengah dalam memperkuat jaringan klaster Industri	Jumlah industri kecil yang dibina	80	80	1.815.000	Disperdagangan	Kota Blitar
					Jumlah Industri Kecil Yang Didata	2375	4792		Disperdagangan	Kota Blitar

PERUBAHAN KEDUA RENSTRA 2016-2021

			3.07.01.07	PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL (DBHCHT) BIDANG PERINDUSTRIAN	Persentase Industri Kecil Terlatih	6,0%	6,25%	1.594.088	Disperdagangan	Kota Blitar
			3.07.01.07.01	Pembinaan dan Pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat di Bidang Perindustrian	Jumlah industri kecil yang dilatih	235	300	1.594.088	Disperdagangan	Kota Blitar
			3.07.01.06	PROGRAM PEMBINAAN INDUSTRI (DBHCHT)	Persentase IHT yang Menerapkan GMP	-	50%	50.000	Disperdagangan	Kota Blitar
			3.07.01.06.01	Pengembangan IHT dengan Kadar Tar dan Nikotin Rendah melalui Fasilitasi Pengujian Tar dan Nikotin Rendah Bagi IKM dan Penerapan GMP bagi IHT	Jumlah Pengusaha Industri Hasil Tembakau yang Mengikuti Penerapan GMP (<i>Good Manufacturing Practice</i>)	-	75	50.000	Disperdagangan	Kota Blitar
			3.06.01.01	PROGRAM PELAYANAN PERKANTORAN	Persentase kecukupan pelayanan perkantoran		100%	1.724.407	Disperdagangan	Kota Blitar
			3.06.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang terbayarkan		132	120.000	Disperdagangan	Kota Blitar

PERUBAHAN KEDUA RENSTRA 2016-2021

			3.06.01.01.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan dinas/Operasional	Jumlah unit kendaraan dinas yang terbayarkan pajaknya		11	7.000	Disperdagangan	Kota Blitar
			3.06.01.01.04	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah tenaga kebersihan non PNS yang tersedia		45	1.222.708	Disperdagangan	Kota Blitar
			3.06.01.01.05	Penyediaan Alat tulis Kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang tersedia		25 jenis	30.000	Disperdagangan	Kota Blitar
			3.06.01.01.06	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang tersedia		5 jenis	35.000	Disperdagangan	Kota Blitar
			3.06.01.01.07	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan yang tersedia		5 jenis	10.000	Disperdagangan	Kota Blitar
			3.06.01.01.09	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang tersedia		22 jenis	20.000	Disperdagangan	Kota Blitar

PERUBAHAN KEDUA RENSTRA 2016-2021

			3.06.01.01.1 0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia		2 jenis	6.000	Disperdagin	Kota Blitar
			3.06.01.01.1 1	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah paket makanan dan minuman yang tersedia		12 paket	20.000	Disperdagin	Kota Blitar
			3.06.01.01.1 2	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi regional dan nasional yang diikuti		48	150.000	Disperdagin	Kota Blitar
			3.06.01.01.2 0	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang terpenuhi		2 jenis	8.000	Disperdagin	Kota Blitar
			3.06.01.01.2 1	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang terpenuhi		3 jenis	7.354	Disperdagin	Kota Blitar

PERUBAHAN KEDUA RENSTRA 2016-2021

			3.06.01.01.2 2	Pengadaan Mebelair	Jumlah jenis meubelair yang terpenuhi		2 jenis	8.345	Disperdagin	Kota Blitar
			3.06.01.01.2 3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara		1	7.500	Disperdagin	Kota Blitar
			3.06.01.01.2 5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara		11 kendaraan	50.000	Disperdagin	Kota Blitar
			3.06.01.01.2 6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang terpelihara		9 jenis	7.500	Disperdagin	Kota Blitar
			3.06.01.01.2 7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang terpelihara		11 jenis	7.500	Disperdagin	Kota Blitar
			3.06.01.01.2 8	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair	Jumlah jenis meubelair yang terpelihara		1 jenis	7.500	Disperdagin	Kota Blitar
			3.06.01.02	Program Peningkatan Kapasitas Perangkat Daerah	Tingkat partisipasi perangkat daerah dalam agenda kota		100%	107.500	Disperdagin	Kota Blitar

PERUBAHAN KEDUA RENSTRA 2016-2021

			3.06.01.02.04	Fasilitasi keperansertaan pada even Daerah dan hari besar Nasional	Jumlah even daerah dan hari besar nasional yang diikuti		3 Keg	100.000	Disperdagin	Kota Blitar
			3.06.01.02.05	Penyebarluasan Informasi program/Kegiatan PD	Jumlah penyebarluasan informasi program/kegiatan PD		3 kali	7.500	Disperdagin	Kota Blitar
			3.06.01.03	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan		100%	25.000	Disperdagin	Kota Blitar
					Nilai SKM		Baik	0	Disperdagin	Kota Blitar
			3.06.01.03.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah jenis dokumen yang tersusun		5 dok	10.000	Disperdagin	Kota Blitar
			3.06.01.03.02	Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah jenis dokumen yang tersusun		3 dok	5.000	Disperdagin	Kota Blitar
			3.06.01.03.03	Penyusunan perencanaan kegiatan dan anggaran	Jumlah jenis dokumen yang tersusun		6 dok	10.000	Disperdagin	Kota Blitar

Tabel 6.1.4. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS PERDAGANGAN DAN PERIDUSTRIAN KOTA BLITAR 2019-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi				
							2019		2020		2021		Target	Rp. (ribuan)			Target	Rp. (ribuan)	Target	Rp. (ribuan)
							Target	Rp. (ribuan)	Target	Rp. (ribuan)	Target	Rp. (ribuan)								
1	3	4	5	6	7	8	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24				
Meningkatkan Kontribusi Perdagangan Terhadap Perekonomian	Meningkatnya pertumbuhan usaha perdagangan	Persentase peningkatan volume usaha perdagangan	3.06.01.06	Program Pengembangan Dan Penguatan Perdagangan	Persentase usaha yang memperoleh fasilitas pengembangan kapasitas	4,50 %	5,2 %	623.473.000	5,5 %	1.223.250.000	6 %	1.223.250.000	6%	3.069.973.000	Disperdagin					
			3.06.01.06.01	Pembinaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima	Jumlah Pedagang kaki lima yang dibina	480 orang	400 unit usaha	229.473.000	400 unit usaha	367.500.000	400 unit usaha	367.500.000	1600 orang	964.473.000	Disperdagin					
					Jumlah PKL yang didata	1300	750 unit usaha		750 unit usaha		750 unit usaha		2.250							
			3.06.01.06.02	Pengembangan dan Pembinaan Usaha Perdagangan	Jumlah usaha perdagangan yang dibina	480	60 pedagang	394.000.000	60 pedagang	855.750.000	60 pedagang	855.750.000	180 pedagang	2.105.500.000	Disperdagin					
				Jumlah usaha perdagangan yang didata	0	12.000 usaha perdagangan		12.000 usaha perdagangan		12.000 usaha perdagangan		36.000		Disperdagin	Kota Blitar					

PERUBAHAN KEDUA RENSTRA 2016-2021

			3.06.01.07	Program Pengembangan Pasar Tradisional	Persentase sarana prasarana pasar dalam kondisi baik	55%	65 %	56.948.706.000	65 %	5.365.452.000	75%	5.365.452.000	75%	67.679.610.000	Disperindag	Kota Blitar
			3.06.01.07.01	Revitalisasi dan Pengelolaan Pasar Tradisional	Jumlah Bangunan Pasar yang Direvitalisasi	3	4 pasar	56.948.706.000	4 pasar	5.365.452.000	4 pasar	5.365.452.000	12 pasar	67.679.610.000	Disperindag	Kota Blitar
					jumlah pedagang yang dipungut retribusi	5.223 pedagang	5.223 pedagang		5.223 pedagang		5.223 pedagang		20.892 pedagang			
			3.06.01.09	Program Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT) Bidang Perdagangan	Jumlah kontak dagang dengan daerah lain	1	5 kontak dagang	500.000.000	5 kontak dagang	803.250.000	7 kontak dagang	803.250.000	17 kontak dagang	2.106.500.000		
			3.06.01.09.01	Fasilitasi Promosi bagi usaha mandiri masyarakat (bidang perdagangan)	Jumlah fasilitasi promosi bagi usaha perdagangan dalam dan luar daerah	0	7 fasilitasi promosi	500.000.000	7 fasilitasi promosi	803.250.000	7 fasilitasi promosi	803.250.000	21 fasilitasi promosi	2.106.500.000		
					Jumlah fasilitasi promosi bagi usaha perdagangan dalam dan luar daerah		750 pengunjung		750 pengunjung		750 pengunjung		2.250 pengunjung			
	Meningkatnya pengawasan perdagangan	Persentase peningkatan pengawasan perdagangan	3.06.01.05	Program Pengawasan dan Pengamanan Perdagangan	Persentase Alat UTTP yang sudah ditera/ teralulung	30%	40 %	1.875.068.600	40 %	2.013.676.800	60%	2.013.676.800	60%	5.902.422.200		

PERUBAHAN KEDUA RENSTRA 2016-2021

					Persentase penurunan minol ilegal yang beredar	15 %	20%		25%		25 %		25%				
			3.06.01.05.01	Pengelolaan Pengawasan Metrologi Legal	Jumlah Alat UTTP yang ditera/tera ulang	5.000	5000 alat UTTP	1.698.313.900	5000 alat UTTP	1.500.000.000	8000 alat UTTP	1.500.000.000	18.000 alat UTTP	4.698.313.900	Disperdagin	Kota Blitar	
			3.06.01.05.02		Jumlah peserta sosialisasi BDKT dan Metrologi	-	550 orang		550 orang		550 orang		1650 orang		Disperdagin		
					Jumlah alat UTTP yang didata		6000 alat UTTP		6000 alat UTTP		8000 alat UTTP		2000 alat UTTP				
					Jumlah UTTP dan BDKT yang diawasi		5000 alat UTTP		750 unit		750 unit		3000 unit				
			3.06.01.05.02	Pengawasan distribusi kebutuhan pokok, penting dan peredaran minuman beralkohol	Jumlah Publikasi Informasi harga dan bahan pokok	550 kali	640 informasi harga	176.754.700	640 informasi harga	513.676.800	640 informasi harga	539.360.800	1820 informasi harga	1.204.108.300			
					jumlah peserta pembinaan pencegahan peredaran minol	625 Orang	1.050 peserta		1.050 peserta		1.050 peserta		2150 peserta		Disperdagin	Kota Blitar	

PERUBAHAN KEDUA RENSTRA 2016-2021

					jumlah laporan monev/ operasi pengawasan peredaran minuman beralkohol (minol)		8 laporan		8 laporan		8 laporan		24 laporan				
			3.06.01.08	Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal (Perdagangan)	Persentase pelanggar barang kena cukai ilegal	0%	0 %	30.000.000	0 %	37.939.000	0%	37.939.000	0%	104.786.000			
			3.06.01.08.01	Pengumpulan Informasi hasil tembakau yang dikati pita cukai Palsu	Jumlah pedagang rokok yang dimintai informasi tentang pita cukai palsu		1680 pedagang rokok	30.000.000	1680 pedagang rokok	37.939.000	1680 pedagang rokok	37.939.000	5040 pedagang rokok	104.786.000	Disperdagin	Kota Blitar	
Meningkatkan Kontribusi Perindustrian Terhadap Perekonomian	Meningkatnya produktivitas Industri	Persentase peningkatan nilai produksi IKM	3.07.01.05	Program Pengembangan Industri Kecil Menengah	Persentase Pertumbuhan Jumlah IKM	2,50 %	1,25 %	573.850.000	1,25 %	1.219.260.000	1,75 %	1.219.260.000	1,75 %	3.012.370.000	Disperindag	Kota Blitar	
			3.07.01.05.01	Pembinaan Industri Kecil dan Menengah	jumlah peningkatan industry kecil		50 unit usaha industri	573.850.000	50 unit usaha industri	1.219.260.000	50 unit usaha industri	1.219.260.000	150 unit usaha industri	3.012.370.000	Disperdagin	Kota Blitar	
					jumlah unit usaha yang terfasilitasi dalam pameran dalam daerah		200 unit usaha		200 unit usaha		200 unit usaha		600 unit usaha		Disperdagin	Kota Blitar	

PERUBAHAN KEDUA RENSTRA 2016-2021

					Jumlah pengunjung yang menyatakan berminat untuk bekerjasama		15 pengunjung		15 pengunjung		15 pengunjung		45 pengunjung			
			3.07.01.07	Program Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT) Bidang Perindustrian	Persentase Industri Kecil Terlatih	6,0%	6,4%	1.470.000.000	6,25%	2.118.663.000	6,90%	2.224.595	6,90%	5.813.258.000	Disperdagin	Kota Blitar
			3.07.01.07.01	Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat	Jumlah Industri Kecil yang dilatih		415 unit usaha industri	1.000.000.000	415 unit usaha industri	1.110.086.000	415 unit usaha industri	1.165.590.000	1245 unit usaha industri	3.275.676.000	Disperdagin	Kota Blitar
					jumlah dokumen monev pelatihan		10 dokumen		10 dokumen		10 dokumen		30 dokumen			
					jumlah unit usaha yang dilakukan pendampingan paska pelatihan		15 unit usaha		15 unit usaha		15 unit usaha		45 unit usaha			
				Fasilitasi Promosi bagi usaha mandiri masyarakat (bidang industri)	Jumlah pengunjung yang menyatakan berminat untuk bekerjasama		25 pengunjung	470.000.000	25 pengunjung	1.008.577.000	25 pengunjung	1.059.005.000	75 pengunjung	2.537.582.000		
			3.07.01.0	Program Pembinaan	Persentase Industri	-	60 %	75.000.000	75 %	168.577.000	75%	168.577.000	75%	412.154.000	Disperdagin	Kota Blitar

PERUBAHAN KEDUA RENSTRA 2016-2021

			6	Industri (DBHCHT)	Hasil Tembakau yang menerapkan Good Manufacturing Practise											
			3.07 .01.0 6.01	Pengembangan Industri Hasil Tembakau dengan Kadar Tar dan Nikotin Rendah Melalui Fasilitasi Pengujian Tar dan Nikotin bagi IKM, dan Penerapan Good Manufacturing Practise bagi IHT	Jumlah pengusaha Industri Hasil Tembakau yang mengikuti Sosialisasi penerapan Good Manufacturing Practises	-	100 orang	75.000.000	100 orang	168.577.000	100 orang	168.577.000	300 orang	412.154.000	Disperdagin	Kota Blitar
			3.06.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase kecukupan pelayanan perkantoran		100%	2.179.152.099	100%	2.443.557.995	100%	2.535.036.519	100%	7.157.746.613	Disperdagin	Kota Blitar
			3.06.01.01.02	Pengelolaan administrasi perkantoran	Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia		25 macam	114.990.000	25 macam	120.739.500	25 macam	126.776.475	125 macam	362.505.975	Disperdagin	Kota Blitar

PERUBAHAN KEDUA RENSTRA 2016-2021

			3.06.01.01.03		Jumlah barang cetakan yang tersedia		13 cetakan		13 cetakan		13 cetakan		39 cetakan		Disperdagingin	Kota Blitar
			3.06.01.01.04		Jumlah lembar penggandaan		45.000 lembar		45.000 lembar		45.000 lembar		135.000 lembar		Disperdagingin	Kota Blitar
			3.06.01.01.05		Jumlah bahan bacaan yang tersedia		2 bahan bacaan		2 bahan bacaan		2 bahan bacaan		6 bahan bacaan		Disperdagingin	Kota Blitar
			3.06.01.01.06		Jumlah dos/kotak makanan dan minuman yang tersedia		700 dos		700 dos		700 dos		2100 dos		Disperdagingin	Kota Blitar
			3.06.01.01.07		Jumlah porsi makanan minuman yang tersedia		200 porsi		200 porsi		200 porsi		600 porsi		Disperdagingin	Kota Blitar
			3.06.01.01.09		jumlah cinderamata khas daerah yang tersedia		20 macam		20 macam		20 macam		60 macam		Disperdagingin	Kota Blitar

PERUBAHAN KEDUA RENSTRA 2016-2021

			3.06.01.01.10	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Jumlah rapat rapat koordinasi dan konsultasi regional dan nasional yang diikuti		50 rakor	100.204.009	50 rakor	178.500.000	50 rakor	178.500.000	150 rakor	457.204.009	Disperda gin	Kota Blitar
			3.06.01.01.11	Penyediaan Jasa Perkantoran	Jumlah tenaga pelayanan perkantoran yang tersedia		50 orang	1.627.458.090	50 orang	1.708.830.995	50 orang	1.794.272.544	150 orang	5.130.561.629	Disperda gin	Kota Blitar
			3.06.01.01.12	Penyusunan Perencanaan, Pengelolaan Dan Pelaporan Sarana Prasarana Perkantoran	Jumlah rekening yang terbayarkan		132 rekening	326.500.000	132 rekening	420.787.500	132 rekening	420.787.500	396 rekening	1.168.075.000	Disperda gin	Kota Blitar
			3.06.01.01.20		Jumlah kendaraan dinas yang terbayarkan pajaknya		16 unit		16 unit		16 unit		48 unit		Disperda gin	Kota Blitar
			3.06.01.01.21		Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia		8 komponen		8 komponen		8 komponen		24 komponen		Disperda gin	Kota Blitar

PERUBAHAN KEDUA RENSTRA 2016-2021

			3.06.01.01.22		Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang tersedia		25 macam		25 macam		25 macam		75 macam		Disperdagin	Kota Blitar
			3.06.01.01.23		Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpenuhi		5 macam		5 macam		5 macam		15 macam		Disperdagin	Kota Blitar
			3.06.01.01.25		Jumlah peralatan gedung kantor yang terpenuhi		6 macam		6 macam		6 macam		18 macam		Disperdagin	Kota Blitar
			3.06.01.01.26		Jumlah perlengkapan bangunan kantor yang terpelihara		5 macam		5 macam		5 macam		15 macam		Disperdagin	Kota Blitar
			3.06.01.01.27		Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara		3 macam		3 macam		3 macam		9 macam		Disperdagin	Kota Blitar
			3.06.01.01.28		Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara		11 unit		11 unit		11 unit		33 unit		Disperdagin	Kota Blitar
			3.06.01.02		Jumlah bangunan kantor yang terpelihara		1 unit		1 unit		1 unit		3 unit		Disperdagin	Kota Blitar

PERUBAHAN KEDUA RENSTRA 2016-2021

			3.06.01.02.04	Penyusunan Dan Pelaporan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen ketatalaksanaan yang tersusun		4 dokumen	6.800.000	4 dokumen	8.400.000	4 dokumen	8.400.000	12 dokumen	23.600.000	Disperdagingin	Kota Blitar
			3.06.01.02.05	Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah jenis dokumen laporan keuangan yang tersusun		3 dokumen	3.200.000	3 dokumen	6.300.000	3 dokumen	6.300.000	9 dokumen	15.800.000	Disperdagingin	Kota Blitar
			3.06.01.03	Program Peningkatan Kapasitas Satuan Kerja Perangkat Daerah	Persentase Aparatur memperoleh kesempatan peningkatan kapasitas		100%	70.000.000	100%	84.000.000	100%	84.000.000	100%	238.000.000	Disperdagingin	Kota Blitar
				Pengelolaan Administrasi Dan Kelengkapan Kepegawaian	Jumlah event daerah dan hari besar nasional yang diikuti		3 even	50.000.000	3 even	63.000.000	3 even	63.000.000	9 even	176.000.000	Disperdagingin	Kota Blitar
			3.06.01.03.01	Pengelolaan publikasi dan informasi Perangkat Daerah	Jumlah publikasi program/kegiatan perangkat daerah		12 publikasi	20.000.000	12 publikasi	21.000.000	12 publikasi	21.000.000	36 publikasi	62.000.000	Disperdagingin	Kota Blitar
			3.06.01.03.02	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan		100%	5.000.000	100%	5.250.000	100%	5.250.000	100%	15.500.000	Disperdagingin	Kota Blitar
			3.06.01.03.03	Penyusunan Dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun		9 dok	5.000.000	9 dok	5.250.000	9 dok	5.250.000	27 dokumen	15.500.000	Disperdagingin	Kota Blitar

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja memberikan gambaran pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2016 - 2021 dan akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar, maka indikator kinerja utama pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar adalah :

1. Indikator : Persentase peningkatan volume usaha perdagangan
Alasan : Untuk mengetahui peningkatan pertumbuhan usaha perdagangan
Sumber Data : Bidang Pengembangan Perdagangan dan Pasar Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar
Formula : $\{(Jumlah\ Usaha\ Perdagangan\ tahun\ n - Jumlah\ Usaha\ Perdagangan\ tahun\ n-1) / Jumlah\ Usaha\ Perdagangan\ tahun\ n-1\} \times 100\ %$
Penanggung Jawab : Bidang Pengembangan Perdagangan dan Pasar

2. Indikator : Persentase peningkatan pengawasan perdagangan
Alasan : Untuk mengetahui peningkatan pengawasan alat Ukur, Timbang, Takar dan Peralatannya (UTTP), pengawasan Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT), pengawasan peredaran minuman beralkohol, dan pengawasan peredaran rokok yang dilekati pita cukai palsu
Sumber Data : Bidang Pengawasan Perdagangan dan Perindustrian Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar
Formula : $\{(Jumlah\ pedagang\ yang\ diawasi\ (UTTP,\ BDKT,\ Minol\ dan\ Rokok\ Ilegal)\ tahun\ n - Jumlah$

- pedagang yang diawasi (UTTP, BDKT, Minol dan Rokok Ilegal) tahun (n-1)) / Jumlah pedagang yang diawasi (UTTP, BDKT, Minol dan Rokok Ilegal) tahun (n-1)); x 100 %
- Penanggung Jawab : Bidang Pengawasan Perdagangan dan Perindustrian
3. Indikator : Persentase peningkatan nilai produksi industri
- Alasan : Untuk mengetahui peningkatan produktivitas industri
- Sumber Data : Bidang Pengawasan Perdagangan dan Perindustrian Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar
- Formula : $\{(\text{Jumlah Nilai Produksi Industri tahun } n - \text{Jumlah Nilai Produksi Industri tahun } n-1) / \text{Jumlah Nilai Produksi Industri tahun } n-1\} \times 100 \%$
- Penanggung Jawab : Bidang Pengawasan Perdagangan dan Perindustrian

Indikator kinerja dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dapat dilihat dalam tabel –tabel di bawah ini

Tabel 7.1.1

Indikator Kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Blitar Tahun 2016

NO	INDIKATOR RPJMD	INDIKATOR RENSTRA	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (2015)	TARGET	REALISASI
				2016	2016
1	2	3	4	5	6
1	Persentase Peningkatan Kontribusi Sektor Perindustrian terhadap PDRB	Persentase Peningkatan Kontribusi Sektor Perindustrian terhadap PDRB	12,4 %	3,6 %	12,96%
2	Persentase Peningkatan Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	Persentase Peningkatan Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	11,7	5,7 %	9,92%
3	Nilai Investasi (Milyaran Rupiah)	Nilai Investasi (Milyaran Rupiah)	158,73 M	160 M	166,8 M

Tabel 7.1.2

Indikator Kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Blitar Tahun 2017

NO	INDIKATOR RPJMD	INDIKATOR RENSTRA	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (2016)	TARGET	REALISASI
				2017	2017
1	2	3	4	5	6
1	Persentase Peningkatan Kontribusi Sektor Perindustrian terhadap PDRB	Persentase Peningkatan Kontribusi Sektor Perindustrian terhadap PDRB	12,96%	11,00 %	Data belum tersedia
2	Persentase Peningkatan Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	Persentase Peningkatan Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	9,92%	11,5 %	Data belum tersedia

Tabel 7.1.3
INDIKATOR KINERJA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA
BLITAR YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
TAHUN 2018-2021

NO	INDIKATOR RPJMD	INDIKATOR RENSTRA	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET					Kondisi Kinerja pada Akhir Th. 2021
			2017	2018	2019	2020	2021		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	
1	Persentase Peningkatan Kontribusi Sektor Perindustrian terhadap PDRB	Persentase Peningkatan Kontribusi Sektor Perindustrian terhadap PDRB	11,00 %	11,36 %	11,36 %	11,36 %	11,7 %	11,7 %	
2	Persentase Peningkatan Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	Persentase Peningkatan Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	11,5 %	11,44 %	11,44 %	11,44 %	11,5 %	11,5 %	

BAB VIII PENUTUP

Perubahan Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar tahun 2016 – 2021 merupakan penjabaran secara operasional dari RPJMD Kota Blitar, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi berdasarkan Peraturan Daerah no. 04 tahun 2013 dan Peraturan Walikota Blitar No. 32 Tahun 2014 adalah sebagai pedoman bagi seluruh staf / bidang – bidang dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan – kegiatan. Dengan demikian kebijakan yang akan diimplementasikan 5 tahun kedepan perlu dijabarkan dalam rencana program dan kegiatan dengan berpedoman kepada Undang-Undang No. 23 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Daerah serta dalam pelaksanaannya sesuai dengan arah kebijakan Pemerintah Daerah Kota Blitar.

Adapun keberhasilan dari Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar sangat tergantung pada kejujuran tekad dan semangat kerja. Transparansi dan inovasi serta komitmen dari pimpinan beserta seluruh staf di jajaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar.

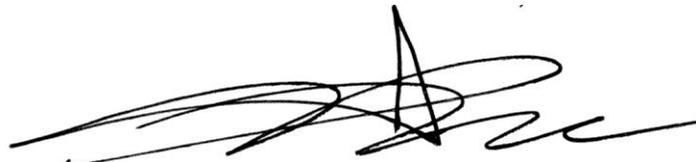
Kami menyadari bahwa penyusunan Rencana Strategis ini masih jauh dari sempurna, semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak terutama dikalangan pelaku usaha dan masyarakat pada umumnya.

Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Perubahan Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar tahun 2016 – 2021 menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja)
2. Seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar berkewajiban untuk melaksanakan program dalam Rencana Strategis secara murni dan konsekuen.

3. Seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar berkewajiban untuk menjaga keterkaitan program dan kegiatan yang dilaksanakan dengan prioritas program.
4. Seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar berkewajiban untuk menggunakan sumber daya organisasi secara efektif dan efisien agar dapat dicapai hasil kinerja yang optimal.
5. Renstra ini digunakan sebagai Acuan Rencana Kerja Tahunan (Renja), RKA dan DPA serta digunakan untuk dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.
6. Jika ada perubahan SOTK maka dilakukan perubahan Renstra yang berpedoman Peraturan Walikota

Blitar, Juli 2018
Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Kota Blitar



ARIANTO S. Sos., M.Si.

Pembina Tk I

NIP 19691018 199101 1 001